



RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KAB. LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026



SARILAMAK, TAHUN 2025

LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karuniaNya Alhamdulillah kami telah dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Akhir Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026. Rencana Kerja ini disusun guna memenuhi kewajiban pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Kami menyadari Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati demi kesempurnaan penyajian Rencana Kerja Akhir yang akan datang kami mengharapkan adanya masukan dari semua pihak. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah turut serta membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Akhir ini sehingga dapat selesai sebagaimana mestinya.

Sarilamak, September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



RIYAN AZMAR, AP, M.Si
NIP. 19730913 199311 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	11
1.3 Maksud dan Tujuan	12
1.4 Sistematika Penusunan Rencana Kerja	13
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	19
2.3 Isu- isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi PD	25
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD.....	33
2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	61
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	61
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah	61
3.3 Program dan Kegiatan	63
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	77
BAB V PENUTUP	95

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Kelender Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2026	3
Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d tahun 2024	14
Tabel 2.2	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategi dan Capaian Indikator.....	20
Tabel 2.3	Hasil Pengukuran Kinerja Berdasarkan Renstra.....	21
Tabel 2.4	Target Dan Proyeksi 2026-2027 Indikator Tujuan dan Sasaran Esselon II.....	22
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah.....	24
Tabel 2.6	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026.....	35
Tabel 2.7	Usulan Program dan Kegiatan Pemangku Kepentingan Tahun 2026.....	40
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	62
Tabel 3.2	Rekapitulasi Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah	63
Tabel 3.3	Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas	66
Tabel 3.4	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretraiat Daerah Pendukung Prioritas	69
Tabel 3.5	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Dan Perkiraan Maju Tahun 2027	71
Tabel 4.1	Rancangan Akhir Rencana Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).....	78
Tabel 4.2	Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2026.....	94

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan 1 (Satu) tahun yang memuat program kegiatan lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Sekretariat Daerah dan RKPD.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan, perencanaan merupakan tahapan awal yang akan menentukan hasil yang akan diperoleh dari pelaksanaan pembangunan. Program/Kegiatan yang direncanakan secara cermat dengan memperhitungkan berbagai aspek yang diharapkan dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program/kegiatan nantinya, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan optimal dan tidak jauh meleset dari yang diharapkan oleh pelaksana.

Terkait dengan perencanaan program/kegiatan pembangunan di Indonesia, hal ini diatur dalam UU No 24 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di katakan bahwa “Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat “.

Proses Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

Dalam melakukan penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan.

Dengan berpedoman pada pasal 16 ayat 2 Permendagri 86 Tahun 2017, Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah sebagai berikut :

I. Persiapan Penyusunan;

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 050/437/BUP-LK/XII/2024 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, maka diadakan orientasi penyusunan Rencana Kerja

Sekretariat Daerah yang melibatkan seluruh Kepala Bagian yang terkait dengan perencanaan pada Bagian masing-masing. Orientasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar sesama anggota tim dalam hal tata cara, kaidah serta jadwal Penyusunan Rencana Kerja.

II. Penyusunan Rancangan Awal Renja;

Sesuai dengan Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota Nomor 050/27/SE/Bapelitbangda-LK/II/2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026. Pada awal bulan Maret 2025 sudah dilaksanakan berbagai sosialisasi mengenai persiapan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah oleh tim penyusun pada Bagian Perencanaan dan Keuangan. Pada tanggal 10 Maret 2025 diadakan Forum OPD. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah dan;
- e. Penutup.

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2024								2025																															
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2	Penyampaian Rancangan Awal Renja PD kepada Perangkat Daerah untuk Diverifikasi																																								
3	Verifikasi Ranwal Renja PD oleh Perangkat Daerah untuk Menjamin bahwa Rancangan Awal Renja PD Sudah Selaras dengan Rancangan Awal RKPD dan Renstra OPD																																								
C	Penyusunan Rancangan Renja 2026																																								
1	Penyusunan Rancangan Renja PD sesuai Ranwal RKPD dan usulan pikir serta hasil Musrenbang																																								
2	Penyampaian Rancangan Renja PD kepada Perangkat Daerah untuk Diverifikasi sebagai Bahan Penyempurnaan Ranwal RKPD menjadi Rancangan RKPD																																								
3	Verifikasi Renja PD oleh Perangkat Daerah untuk																																								

III. Penyusunan Rencana Kerja;

Penyusunan Rencana Kerja yang disempurnakan mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada RKPD. Penyajian Rencana Kerja Sekretariat Daerah disajikan dengan sistematika yang sama dengan RKPD.

IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

Berdasarkan hasil koordinasi Bapelitbangda dan OPD, maka demi efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Forum OPD dilaksanakan secara gabungan yang diatur oleh Bapelitbangda, dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Adapun forum OPD Sekretariat Daerah dilakukan pada tanggal 10 Maret 2025

Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang hadir pada forum Gabungan Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

V. Perumusan Rencana Akhir Renja;

Perumusan Rencana Akhir Renja Sekretariat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Hal ini dilaksanakan pada bulan Juli 2025 yang dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

VI. Penetapan.

Dalam hal penetapan Rencana Kerja, Bapelitbangda mengumpulkan Rancangan Akhir Rencana Kerja semua Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan selanjutnya dijadikan sebagai bahan penetapan Peraturan Bupati. Rencana Kerja Sekretariat Daerah mempedomani Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026.

Keterkaitan Antara Rencana Kerja Sekretariat Daerah Dengan Dokumen RKPD

Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi serta perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yakni sebagai pedoman dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Pelaporan Anggaran Sementara (PPAS).

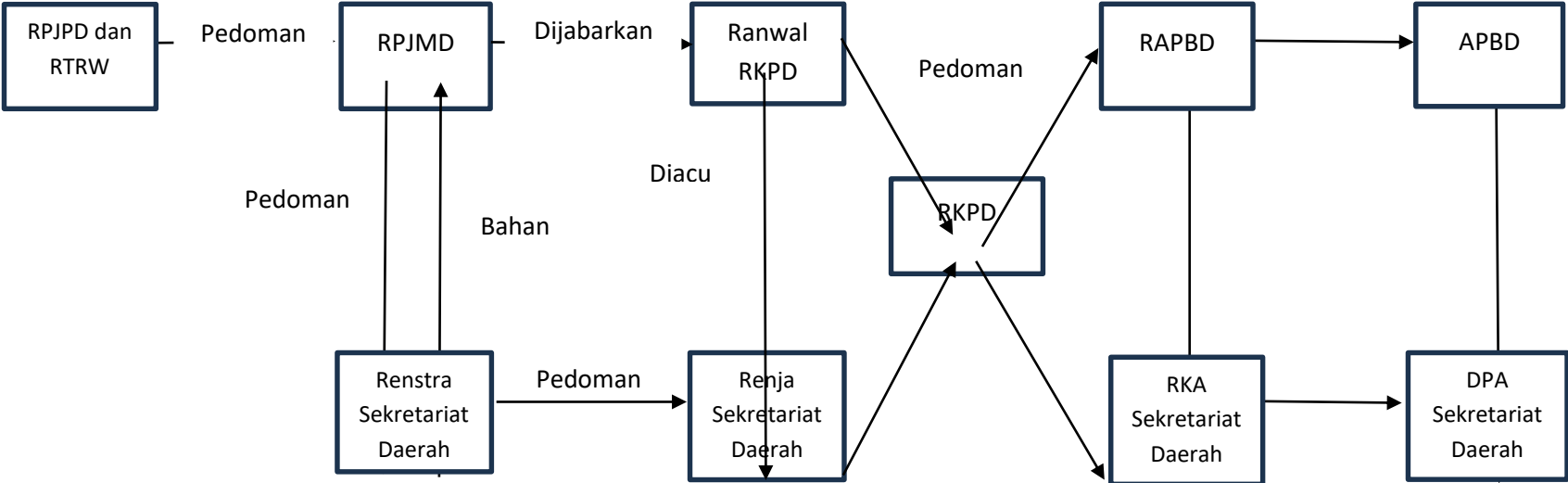
Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD).

Dilanjutkan setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai Dokumen Perencanaan Tahunan. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga harus mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kebijakan pemerintah Pusat/Provinsi.

Adapun keterkaitan antar Dokumen Perencanaan dapat dilihat pada Bagan berikut :

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 pada unit kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan

- Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 102);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
 12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
 14. Peraturan Daerah No 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2)
 16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 14 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 14);
 17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
 18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 40).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 ini adalah :

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2026 ini adalah untuk menetapkan arah kerja serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan maupun mengevaluasi program dan kegiatan di Sekretariat Daerah.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2026 ini adalah :

- Untuk menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam renstra .
- Menjadi Pedoman dalam Penyusunan KUA-PPAS Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026.
- Menjadi Pedoman untuk dapat mencapai hasil yang berdaya guna dan berhasil guna (efektif dan efisien) sehingga mengurangi potensi kerugian dan kegagalan dalam menjalankan kegiatan dana/anggaran, terutama dalam hal penggunaan dan pengelolaan dana/anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dipakai dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 ini meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum dan hubungan dengan dokumen RKPD serta sistematika laporan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun lalu berisikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi, dan review terhadap RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah menguraikan tentang tujuan yang hendak dicapai, dan sasaran serta target pencapaian pembangunan satu tahun kedepan, yang dijabarkan melalui program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang rencana kerja dan sasaran yang dicapai pada Tahun 2026 serta pendanaan kegiatan pada masing-masing Bagian di Sekretariat Daerah.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (Tahun 2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2025), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah dan Realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Sekretariat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) pada Tahun Anggaran 2025, memiliki 3 (Tiga) Program yang diwujudkan dengan 19 (Semblian Belas) Kegiatan dan 64 (Enam Puluh Empat) Sub Kegiatan. Dimana pelaksanaan Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 10 (Sepuluh) bagian di lingkup Sekretariat Daerah. Secara umum pelaksanaan Program/kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah sedang berjalan Tahun 2025.

Berikut ini ditampilkan review dan pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 di Sekretariat Daerah beserta realisasi anggarannya.

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Lima Puluh Kota**

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target program dan kegiatan Rencana Kerja SKPD tahun berjalan (tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2025	
					Target Rencana Kerja SKPD tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/ 4)
4 1 1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	51%	17%	74%	79%	22%	88%	88%
4 1 1 2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD	100%	59%	20%	96%	95%	20%	98%	98%
4 1 1 2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4 1 1 2.06	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	60%	20%	63%	63%	20%	93%	93%
4 1 1 2.07	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100%	53%	7%	11%	33%	51%	106%	106%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target program dan kegiatan Rencana Kerja SKPD tahun berjalan (tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2025				
					Target Rencana Kerja SKPD tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
4	1	1	2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	60%	20%	100%	100%	20%	100%	100%
4	1	1	2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100%	59%	19%	87%	100%	18%	93%	93%
4	1	1	2.11	Kegiatan : Administrasi keuangan dan opsional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Persentase terlaksana adminitrasi keuangan dan operasional KDH	100%	41%	28%	81%	100%	28%	90%	90%
4	1	1	2.12	Kegiatan : Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	Persentase terpenuhinya fasilitasi kerumah tanggaan KDH, Wakil KDH dan Sekda	100%	60%	20%	100%	100%	20%	100%	100%
4	1	1	2.13	Kegiatan : Penataan Organisasi	OPD yang memiliki dokumen Analisis Jabatan Persentase OPD yang sesuai tugas pokok dan fungsi	100%	60%	20%	100%	100%	20%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target program dan kegiatan Rencana Kerja SKPD tahun berjalan (tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2025					
					Target Rencana Kerja SKPD tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
4	1	1	2.14		Kegiatan : Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelaksanaan kegiatan potokol dan komunikasi pimpinan	100%	60%	20%	100%	100%	20%	100%	100%
4	1	2			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	61%	49%	80%	112%	124%	212%	212%
4	1	2	2.01		Kegiatan : Administrasi Tata pemerintahan	Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan	100%	50%	20%	100%	100%	20%	90%	90%
4	1	2	2.02		Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kegiatan terkait dengan kesejahteraan rakyat yang terkoordinasi	100%	38%	7%	28%	83%	20%	50%	50%
4	1	2	2.03		Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase pelaksanaan fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100%	83%	159%	51%	86%	447%	610%	610%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target program dan kegiatan Rencana Kerja SKPD tahun berjalan (tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2025				
					Target Rencana Kerja SKPD tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
4	2	2	4	Kegiatan : Fasilitas Kerjasama Daerah	Persentase Pelaksanaan Fasilitas Kerjasama Daerah	100%	72%	11%	141%	1292%	11%	99%	99%
4	1	3		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase terlaksananya koordinasi an fasilitasi bidang perekonomian	100%	56%	18%	100%	100%	20%	94%	94%
4	1	3	2.01	Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi bidang Perekonomian	100%	50%	17%	100%	100%	17%	83%	83%
4	1	3	2.02	Kegiatan: Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah	100%	60%	20%	100%	100%	20%	100%	100%
4	1	3	2.03	Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi SPSE sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku	100%	62%	20%	100%	100%	26%	108%	108%
4	1	3	2.04	Kegiatan: Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	Laporan penunjang kegiatan	100%	50%	17%	100%	100%	17%	83%	83%

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi Renja Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- I. Program dan kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan di Sekretariat Daerah selama Tahun Anggaran 2024, antara lain:
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, namun realisasi pencapaiannya adalah sebesar 79%, Hal ini disebabkan karena adanya *refocusing* anggaran. Kegiatan yang realisasinya tidak mencapai 100% adalah :
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, namun terealisasi sebesar 77%.
 - b. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, namun terealisasi sebesar 67%.
 - c. Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, namun terealisasi sebesar 50%
 - d. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, namun terealisasi sebesar 33%
 2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, namun realisasi pencapaiannya adalah sebesar 79%, Hal ini disebabkan karena adanya *refocusing* anggaran. Kegiatan yang realisasinya tidak mencapai 100% adalah :
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, namun terealisasi sebesar 83%.
 - b. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, namun terealisasi sebesar 86%.
- II. Program dan kegiatan yang **telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain :
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%. Kegiatan yang realisasinya mencapai 100%.
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, namun terealisasi sebesar 100%.
 - b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.
 - d. Kegiatan Administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, namun terealisasi sebesar 100%.
 - e. Kegiatan Penataan Organisasi direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.

- f. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.
 - g. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.
 - h. Kegiatan Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.
 - i. Kegiatan Penataan Organisasi, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.
 - j. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.
 - k. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%. Kegiatan yang realisasinya mencapai 100%.
- a. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%.
3. Program Perekonomian dan Pembangunan, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi sebesar 100%. Kegiatan yang realisasinya mencapai 100% adalah :
- a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasinya sudah tercapai sebesar 100%.
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasinya sudah tercapai sebesar 100%.
 - c. Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasinya sudah tercapai sebesar 100%.
 - d. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasinya sudah tercapai sebesar 100%.

III. Program dan kegiatan yang **melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan di Sekretariat Daerah selama Tahun Anggaran 2024, antara lain:

- 1. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya sudah sebesar 181,25%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 13 Tahun 2019. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja yang dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja yang disesuaikan dengan kriteria yang berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sesuai dengan tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Klasifikasi Penilaian Dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategi Dan Capaian Indikator

NO	KLASIFIKASI PENILAIAN	PREDIKAT
1	91% – 100%	Sangat Tinggi
2	76% – 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Realisasi Dan Persentase Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021-2026 yang disusun seperti tabel berikut :

Tabel 2.3

HASIL PENGUKURAN KINERJA BERDASARKAN RENSTRA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PREDIKAT
1.	Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang Pemerintahan	90%	90%	100%	Sangat Tinggi
		Indeks ABS - SBK	1,7	1,95	114,7%	Sangat Tinggi
		Persentase Jumlah Produk Hukum Daerah yang dipublikasikan melalui JDIH	90%	100%	111%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Peningkatan Koordinasi sektor perekonomian	82%	82%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase OPD dengan Pencapaian Program dan Kegiatan diatas 80%	90%	90%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi SPSE yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku	90%	90%	100%	Sangat Tinggi
3.	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum yang efektif dan efisien	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	90%	100%	111%	Sangat Tinggi
		Nilai komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	10,15	10,26	101,1%	Sangat Tinggi
		Persentase Terwujudnya Fasilitasi kegiatan protokol dan Komunikasi Pimpinan sesuai standar keprotokolan yang berlaku	90%	100%	111%	Sangat Tinggi
		Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan Sekretariat Daerah yang tersedia	9 dokumen	9 dokumen	100%	Sangat Tinggi

**Tabel 2.4 Target Dan Proyeksi 2026-2027
Indikator Tujuan Dan Sasaran Esselon II**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target							
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pelayanan publik, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta Meningkatkan peran masyarakat dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	62.98	64.28	65.78	66.71	68.93	70.76		
			Indeks Pelayanan Publik	4.31	4.35	4.40	4.44	4.49	4.54		
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	90%	90%	90%	90%	90%	90%		
			Indeks Kepuasan Layanan Pimpinan (IKLP)	95	95	95	95	95	95		
			Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	62.98	64.28	65.78	66.71	68.93	70.76		
		Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase Capaian Pengendalian dan pelaporan administrasi pembangunan	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00		
			Persentase Kebijakan Pengelolaan Perekonomian yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			Indeks Tata Kelola pengadaan	78,60	81,50	82,50	84,50	86,40	88,40		
		Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Indeks ABS-SBK	2,10	2,14	2,18	2,22	2,26	2,30		
					Indeks Reformasi Hukum	70	73	76	79	82	85
					Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2,90	2,92	2,94	2,96	2,98	3,00

Dalam rangka menjalankan fungsi sebagai administrator dan fasilitator yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota berupaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan cara melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai Visi dan Misi Sekretariat Daerah dalam rangka membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikannya dengan Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.

Untuk mendukung Visi dan Misi dimaksud, diperlukan kinerja pelayanan yang terdiri dari :

1. Penyelenggaraan administrasi pertanahan, hukum dan HAM, pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat, pembangunan, perekonomian, hubungan kemasyarakatan, organisasi dan reformasi birokrasi, serta pelayanan administrasi umum lainnya.
2. Penyelenggaraan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan pada lingkup Sekretariat Daerah.
3. Melakukan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah.
4. Pelayanan Teknis Administratif Kepala Daerah dan seluruh Perangkat Daerah dilingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dilihat dari kinerja pelayanan kinerja tersebut diatas dapat dijelaskan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah beserta pengembangan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang telah dilakukan, yang mencakup hal-hal positif yang berhasil ditingkatkan, masalah dan tantangan yang dihadapi terkait pelayanan dan kondisi/prediksi pelayanan Perangkat Daerah yang diharapkan kedepan.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 terdapat IKU Daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah/Bagian Kesejahteraan Rakyat yaitu “Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya saing yang berlandaskan keimanan.”

Penilaian indeks ABS-SBK dilaksanakan oleh Tim Penilai yang di SK kan Oleh Bupati Lima Puluh Kota, sedangkan untuk pengambilan nilai indeks nya dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner ke 79 Nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dan telah dimulai pada Tahun 2022. adapun indeks yang menjadi dasar penilaian adalah 1. Indeks Sumber Daya Manusia Keagamaan 2. Indeks Infrastruktur dan Kelembagaan Keagamaan 3. Indeks Keuangan Sosial 4. Indeks Sumber daya Manusia Adat dan Budaya 5. Indeks Kelembagaan Adaat dan Budaya. Capaian IKU yang menjadi tugas pada Bagian Kesra terlihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	SPM / standar nasional	IKK /IKU KD	Target Restra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun2026 (thn n)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1	Indeks ABS-SBK		IKD	1,7	1,8	1,8	1,9	1,95	Na	1,9	
2	1. Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi bidang Pemerintahan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	2. indeks ABS-SBK			1,7	1,8	1,8	1,9	1,95	Na	1,9	
	3. Persentase jumlah produk Hukum Daerah yang dipublikasikan melalui JDIH			100%	100%	100%	100%	100%	Na	100%	
3	4. Persentase Peningkatan Koordinasi Sektor Perekonomian (%)			82%	83%	84%	85%	82%	Na	85%	
	5. Persentase OPD dengan Pecapaian Program dan Kegiatan diatas 80%			100%	100%	100%	100%	90%	Na	100%	

No	Indikator	SPM / standar nasional	IKK /IKU KD	Target Restra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	6. Persentase Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi SPSE yang sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku			90%	91%	92%	93%	90%	Na	93%	
4	7. Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi Baik			100%	100%	100%	100%	100%	Na	100%	
	8. Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja			70	71	72	10,28	10,26	Na	73	
	9. Terwujudnya Fasilitasi Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sesuai Standar Keprotokolan Yang Berlaku			100%	100%	100%	100%	100%	Na	100%	
	10. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah yang tersedia			9 dok	9 dok	9 dok	9 dok	9 dok	Na	9 dok	

Indeks ABS-SBK merupakan instrumen yang digunakan untuk mengatur ketercapaian tujuan dan sasaran pada Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan”. Dari tabel diatas terlihat bahwa pada Tahun 2024 realisasi pencapaian Indeks ABS-SBK sebesar 1.8 melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 1,95. Adapun Variabel indeks yang dinilai adalah :

1. Indeks Sumber Daya Manusia Keagamaan
 - Indeks Pendidikan Al Qur'an
 - Indeks Peran PKBM
 - Indeks Pendidikan TPQ/MDA/TPA, Didikan Subuh dan Pembinaan Remaja Masjid
 - Indeks Kapasitas Guru Agama
 - Indeks Perguruan Tinggi Keagamaan
 - Indeks Pembinaan Keagamaan Masyarakat
2. Indeks Infrastruktur dan Kelembagaan Keagamaan
 - Indeks Kelembagaan Masjid/Surau/TPQ
 - Indeks Digitalisasi Manajemen Masjid
 - Indeks Sarana dan Prasarana Keagamaan
3. Indeks Keuangan Sosial
 - Indeks Penghimpun Dana Sosial Keagamaan dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi dan Sosial Keagamaan
 - Indeks Perlindungan Sosial Ekonomi terhadap Wanita, Anak-anak dan Keluarga Miskin
4. Indeks Sumber Daya Manusia Adat dan Budaya
 - Indeks forum perantau dalam partisipasi kegiatan keagamaan, sosial budaya, pelestarian adat dan pendidikan Nagari
 - Indeks semangat musyawarah masyarakat Nagari
 - Indeks peran dan kapasitas ninik mamak dan imam khatib dalam pembinaan adat, seni budaya dan olah raga yang sesuai dengan ABS-SBK
 - Indeks partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam Nagari untuk mencapai lingkungan yang bersih
 - Indeks pembinaan adat dan budaya di masyarakat
 - Indeks pelanggaran terhadap peraturan Nagari
5. Indeks Kelembagaan Adat dan Budaya
 - Indeks peran dan fungsi Limbago Adat (Kerapatan Adat Nagari, Bundo Kandung)
 - Indeks peran dan fungsi organisasi masyarakat keagamaan Nagari
 - Indeks fungsi organisasi pemuda
 - Indeks penguatan regulasi

Untuk mendukung IKU daerah tersebut beberapa kegiatan yang mendukung antara lain yaitu Kegiatan Baliak Basurau, dimana melalui kegiatan ini difasilitasi guru mengaji pada TPQ, MDTA dan Surau serta Imam dan Gharin Masjid sebanyak 3.305 orang yang tersebar diwilayah Kabupaten Lima Puluh Kota,. Fasilitasi yang diberikan berupa honor yang nilainya lebih kurang mencapai Rp. 4,14 Milyar.

Disamping itu juga didukung oleh program unggulan daerah Satu Nagari Satu Rumah Tahfizh, dimana pada Tahun 2023 telah di tetapkan sebanyak 43 Unit rumah tahfizh sebagai rumah tahfizh binaan di Nagari dengan 84 orang guru yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, berupa honor guru tahfizh dan pada tahun 2024 jumlah rumah Tahfizd Binaan

Nagari bertambah menjadi 62 Rumah Tahfizh dengan jumlah guru yang bertambah sebanyak 122 orang.

Persentase Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi SPSE yang sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku terealisasi sebesar 97%, melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 88%. Sementara Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja realisasinya sebesar 70,40, juga melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 70. Adapun indikator yang kurang dari target yaitu persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik ralisasinya sebesar 90%, kurang dari target yang ditetapkan yaitu 100% karena adanya penyusutan sarana dan prasarana kantor. Sedangkan pencapaian indikator yang lain sudah terpenuhi sebesar target yang ditetapkan.

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan misi yang diemban Kepala Daerah terdapat beberapa misi yang dilaksanakan pada Sekretariat Daerah yaitu : pada Misi ke-4 yaitu : 4 meningkatkan kualitas layanan publik melalui Reformasi Birokrasi seutuhnya. Adapun Pelayanan Sekretariat Daerah pada Tahun 2022-2025 sebagaimana pada tabel diatas.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Sekretariat Daerah, Kajian hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Masing-masing bagian dilingkup Sekretariat Daerah memiliki beberapa isu yang terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya antara lain :

a. Tingkat kinerja pelayanan Sekretariat Daerah

Terkait tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah. Sejauh ini Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan telah menjalankan Fasilitasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan lebih dominan pada kegiatan Pimpinan yang pelaksanaannya dalam daerah, sementara untuk kegiatan luar daerah masih minim difasilitasi oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Hal ini dikarenakan masih minimnya anggaran dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Sementara untuk merealisasikan visi dan misi serta program unggulan Kepala Daerah sudah seyogyanya selaras dengan Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan yang optimal. Dimana bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan ini merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan kegiatan Kepala Daerah dan terwujudnya citra positif dari masyarakat terhadap pemerintah melalui fasilitasi layanan kedinasan, Komunikasi Pimpinan dan dokumentasi rangkaian kegiatan KDH/WKDH. Dapat dikatakan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan adalah jembatan penghubung antara Kepala Daerah dengan Leading Sektor penyelenggara kegiatan. Dalam kata lain Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan ini melekat dan sejalan dengan Kegiatan Pimpinan. Hal inilah yang harus dipahami bersama oleh seluruh organisasi perangkat daerah. Jika kegiatan Kepala Daerah dapat terfasilitasi, terdokumentasi dan terpublikasi dengan optimal, maka visi dan misi serta program unggulan dari Kepala Daerah dapat terpublikasi dan tersebar luas kepada masyarakat.

Pada Bagian Umum kinerja pelayanan public merupakan hal penting seiring tingginya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari Pemerintah. Pelayanan yang diberikan bagian umum yakni persuratan beserta distribusinya, transportasi untuk kedinasan, pemakaian ruangan beserta fasilitasnya, pelayanan pemenuhan

kebutuhan pada rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati, ketersediaan sarana dan prasarana gedung kantor.

Terkait tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah. Sejauh ini Bagian Hukum telah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan peraturan dan evaluasi dibidang peraturan perundang-undangan batuan hukum serta dokumentasi dan informasi.

Peningkatan disiplin kerja, tertib dalam hal pengelolaan administrasi dan keuangan merupakan kewajiban yang telah menjadi bagian dari upaya perbaikan penyelenggaraan birokrasi tersebut. Oleh karena itu Bagian Perencanaan dan Keuangan senantiasa melakukan koordinasi, konsultasi, konfirmasi serta membangun jejaring internal dan eksternal demi terselenggaranya pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan yang efektif dan efisien yang tentunya tak lepas dari isu-isu penting penyelenggaraan tugas Bagian Perencanaan dan Keuangan seperti terselenggaranya administrasi dan penatausahaan keuangan di lingkup Sekretariat Daerah sehingga pengelolaan keuangan Daerah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam hal sinergi dan koordinasi Bagian Perencanaan dan Keuangan dilaksanakan dilingkup Sekretariat Daerah dengan berkonsultasi ke Badan Keuangan serta Inspektorat Kabupaten dalam rangka evaluasi dan pengawasan.

Pada umumnya kinerja pelayanan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa telah mengalami peningkatan dilihat dari realisasi pencapaian sasaran dan indikator kerja namun dalam upaya menjalankan tugas pelayanan kepada SKPD (Pelaku Pengadaan) perlu adanya peningkatan realisasi pencapaian kinerja. Hal ini sangat penting dalam upaya pencapaian tujuan bagian pengadaan barang dan jasa yaitu terlaksananya pelayanan prima bagi SKPD (Pelaku Pengadaan).

Koordinasi dan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan dengan pemerintah daerah provinsi dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) untuk pencapaian kinerja masih terbatas. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yaitu : Pengelolaan LPSE, Pembinaan SDM, pendampingan advokasi tidak sepenuhnya tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan anggaran.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Bagian Pemerintahan melaksanakan program dan kegiatan yang melibatkan Perangkat Daerah, Lembaga dan Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Harmonisasi hubungan antar Satuan Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima puluh Kota.
2. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah se-Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Peningkatan Harmonisasi hubungan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.
4. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah.
5. Implementasi Kesepakatan Bersama (MoU) antar daerah dan pihak ketiga dalam bentuk perjanjian kerjasama.
6. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan mulai dari tahap penawaran MoU sampai implementasi MoU berupa Perjanjian Kerjasama.
7. Pengembangan potensi ranah yang perlu dikoordinasikan dengan perantau

8. Peningkatan partisipasi daerah dalam organisasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia
9. Pelaksanaan fasilitasi peninjauan kerja sama dengan Luar Negeri baik dalam bentuk KSDPL maupun KSDLL
10. Evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama daerah yang telah difasilitasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Melalui kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD diselenggarakan koordinasi dan monitoring terhadap BUMD yaitu Perumda Tirta Luak Nan Bungsu, dan BLUD yaitu BLUD Puskesmas dan RSUD dr. Achmad Darwis serta BPR yang ada penyertaan modal dari Pemerintah Daerah.

Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dilaksanakan dalam rangka program prioritas Pengendalian Inflasi melalui zoom meeting bersama Menteri Dalam Negeri setiap senin, High Level Meeting (HLM), Capacity Building dan koordinasi terkait Kerjasama Antar Daerah (KAD). Selain itu juga dilaksanakan inovasi dengan penyusunan Aplikasi Informasi Harga Barang Pokok untuk memantau kenaikan Indeks Perubahan harga (IPH).

Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan terhadap TPAKD dan pelaku ekonomi potensial dan UMKM.

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam dibagi untuk : 1. Pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan melalui kegiatan Perhutanan Sosial, Koordinasi pelaksanaan DBHCHT, dan Koordinasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3); 2. Pertambangan dan Lingkungan Hidup dalam bentuk pemenuhan data terkait sumber daya alam (energi, air, listrik dan pertambangan).

Bagian Pemerintahan dalam pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab yang diimplementasikan ke dalam tugas dan fungsi lembaga berupaya mewujudkan dan menjalankan visi dan misi daerah sebagai komitmen bersama. Upaya yang dilakukan merupakan tindakan preventif dan antisipatif sebagai langkah pengendalian terhadap berbagai permasalahan dibidang Pemerintahan secara umum yang perlu dilakukan pembenahan dan pengaturan melalui regulasi dan kebijakan yang konkrit. Inventarisasi permasalahan maupun Isu-isu teraktual pada penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkembang dari tahun sebelumnya dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk menentukan langkah-langkah nyata yang dijadikan filosofis penetapan program dan kegiatan.

Terkait tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dibagian organisasi dapat dilihat dari koordinasi dan sinergi program dengan perangkat daerah provinsi atau perangkat daerah lainnya serta kementerian/lembaga dilakukan untuk pencapaian kinerja pembangunan yang lebih berkualitas dan efektif agar penganggaran. Saat ini lemahnya

koordinasi dan komitmen Perangkat Daerah dalam menggunakan sistem penyelenggaraan Perangkat Daerah.

Pada Bagian Kesra sebagaimana tugas pokok dan fungsi, maka tugas Bagian Kesra adalah melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan tugas pokok tersebut maka salah satu Bagian Kesra adalah pengkoordinasian pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu peningkatan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.

Untuk mengukur sejauh mana penerapan agama, adat dan budaya di tengah-tengah masyarakat tersebut diperlukan instrumen dalam bentuk Indeks ABS-SBK. Agar instrumen dimaksud bisa dilaksanakan maka harus ditetapkan dalam bentuk regulasi yaitu Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Indeks ABS-SBK.

Disamping itu untuk mendukung Visi dan Misi daerah, Bagian Kesra juga melaksanakan program unggulan "*satu Nagari satu rumah tahfizh*". Oleh karena itu target rumah tahfizh yang dibina adalah 79 Unit (Rumah Tahfizh Binaan) yang tersebar dimasing-masing Nagari. Untuk mendukung Program ini telah dilahirkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No.33 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Rumah Tahfizh dan Program Tahfizh.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah antara lain:

1. Masih rendahnya pemahaman OPD dilingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap tugas dan fungsi.
2. Kurangnya koordinasi leading sektor pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mengenai pelaksanaan acara yang dihadiri oleh pimpinan.
3. Belum optimalnya koordinasi leading sektor dengan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mengenai penyiapan bahan komunikasi pimpinan.
4. Belum memadainya peralatan dan perlengkapan kantor untuk pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Daerah.
5. Masih terbatasnya ketersediaan anggaran di beberapa bagian yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Kurangnya inovasi dan disiplin ASN di lingkup Pemda Lima Puluh Kota.
7. Kurangnya tenaga fungsional dibidang perancang peraturan perundang-undangan dan minimnya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur perancang peraturan perundang-undangan.
8. Belum memadainya Sarana dan Prasarana yang ada pada beberapa bagian yang ada di Sekretariat Daerah.
9. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ, seperti pelaksanaan advokasi, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan kontrak, dan mengikuti pendidikan dan pelatihan oleh personil di UKPBJ.
10. Belum optimalnya SKPD dalam melakukan penetapan perencanaan pengadaan seperti penetapan dan pengumuman Rencana Umum

- Pengadaan (RUP) dalam Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
11. Belum optimalnya Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pengendalian kontrak.
 12. Belum maksimalnya pemahaman SKPD dalam melaksanakan prioritas belanja menggunakan Katalog Elektronik Lokal.
 13. Belum tersedianya data yang lengkap dari seluruh Nagari terhadap pengusulan dan pemenuhan data-data terkait sumber daya alam (Listrik, Gas, Pertambangan, dan energi).
 14. Belum optimalnya penyesuaian dan alokasi anggaran program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang diarahkan untuk pengendalian inflasi.
 15. Belum optimalnya Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dalam melakukan pengawasan terhadap pupuk bersubsidi.
 16. Peningkatan Harmonisasi hubungan antar Satuan Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima puluh Kota.
 17. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di seluruh Kecamatan se Kabupaten Lima Puluh Kota
 18. Peningkatan Harmonisasi hubungan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.
 19. Inventarisasi kebutuhan kerjasama daerah yang sudah teranggarkan pada APBD Kabupaten.
 20. Implementasi Kesepakatan Bersama (MoU) antar daerah dan pihak ketiga dalam bentuk perjanjian kerjasama.
 21. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan mulai dari tahap penawaran MoU sampai implementasi MoU berupa Perjanjian Kerjasama.
 22. Pengembangan potensi ranah yang perlu dikoordinasikan dengan perantau
 23. Peningkatan partisipasi daerah dalam organisasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia
 24. Pelaksanaan fasilitasi penajakan kerja sama dengan Luar Negeri baik dalam bentuk KSDPL maupun KSDLL
 25. Evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama daerah yang telah difasilitasi
 26. Program yang digunakan pada Restra periode sebelumnya belum mampu mempresentasikan tugas secara optimal.
 27. Belum optimalnya input rekomendasi dalam rangka penyusunan/ kebijakan daerah.
 28. Belum optimalnya input informasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah.
 29. Belum optimalnya pengoordinasian upaya pencapaian target pembangunan yang dilaksanakan Perangkat Daerah.
 30. Masih kurangnya Kapasitas SDM Sehingga belum cukup memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah secara optimal.
 31. Belum optimalnya fungsi pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
 32. Masih belum optimalnya koordinasi yang dilaksanakan dengan stakeholders terutama lembaga-lembaga keagamaan, yang mengakibatkan sinkronisasi program dan kegiatan tidak berjalan optimal seperti pelaksanaan MTQ yang menyebabkan prestasi kafilah Kab. Lima Puluh Kota cukup rendah.

c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

1. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Daerah jika permasalahan dan hambatan tidak segera diminimalkan.
2. Kurang optimalnya layanan ke pimpinan berdampak terhadap pelaksanaan acara Bupati serta berpotensi terhambatnya informasi sampai ke masyarakat tentang pelaksanaan visi misi Kepala Daerah.
3. Tidak terpenuhinya semua kebutuhan sarana dan prasarana di beberapa bagian di lingkup Sekretariat Daerah.
4. Dampak bagi Visi dan Misi Kepala Daerah diantaranya adalah, karena terkendala dalam Sumber Daya Manusia para pengelola keuangan yang belum memahami penatausahaan, belum menguasai aplikasi dan memahami aturan yang berlaku, sehingga berdampak pada visi dan misi Kepala Daerah yang tidak optimal.
5. Dampak bagi Visi dan Misi Kepala Daerah kurang maksimalnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang memenuhi tujuan dan prinsip pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, dan akuntabel.
6. Dampak yang dihadapi oleh beberapa bagian bila kurang optimalnya koordinasi dan kerjasama semua stakeholders adalah akan terhambatnya pelaksanaan kebijakan dan upaya peningkatan perekonomian daerah dan kebijakan di bidang SDA.
7. Dampak yang dihadapi oleh Bagian pemerintahan adanya perbedaan aturan yang mengatur tentang kerjasama dari beberapa kementerian dengan kerjasama yang bersifat teknis yang mengakibatkan lambatnya/belum dapat mewujudkan kerjasama yang akan dibangun, Kurangnya Komitmen Perangkat Daerah merencanakan dan melaksanakan Kerja Sama yang dibutuhkan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
8. Dampak yang dihadapi oleh Bagian Kesra adalah akibat dari permasalahan yang ada maka kegiatan yang dilaksanakan pada Bagian Kesra dalam rangka mendukung visi dan misi Kepala Daerah akan terkendala terutama yang terkait dengan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat.

d. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan yang dihadapi dalam fasilitasi kegiatan pimpinan yaitu semakin berkembangnya teknologi dan informasi terkait penyebaran informasi publik ditengah keterbatasan sarana dan prasarana.
Peluang yang dimiliki adalah dengan semakin berkembangnya sosial media menjadi media alternatif yang dimanfaatkan dalam menyajikan informasi terkait kegiatan Kepala Daerah.
2. Tantangan yang dihadapi adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana gedung kantor, rumah dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional, Perkembangan IPTEK yang tidak disertai dengan kesiapan SDM sehingga menyebabkan pelayanan publik tidak maksimal (karena tidak profesional) serta Peningkatan kompetensi SDM.
Peluang yang dimiliki yaitu Perlunya koordinasi/kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten serta pemenuhan anggaran dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.
3. Tantangan yang dihadapi yaitu kurangnya tenaga/ aparaturnya yang memiliki kualifikasi terhadap Perancang Peraturan Perundang-

Undangan melalui pengusulan ke Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.

Peluang yang dimiliki adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Perangkat Daerah dalam Penyusunan Produk Hukum melalui Bimtek dan Sosialisasi.

4. Tantangan yang dihadapi dalam Penyusunan Produk Hukum dan Informasi Hukum yaitu semakin berkembangnya teknologi dan informasi terkait penyebaran informasi publik tengah keterbatasan sarana dan prasarana.

Peluang yang dimiliki adalah dengan memenuhi sarana dan prasarana dalam bentuk optimalisasi penyediaan perangkat elektronik seperti infocus, laptop, komputer serta persiapan dokumen yang representatif serta tenaga ITE dalam pengelolaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

5. Tantangan yang dihadapi adalah tuntutan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan, Kemajuan Teknologi, serta SDM yang masih terbatas.

Peluang yang dimiliki adalah Birokrasi yang masih sangat dibutuhkan masyarakat, Reformasi pelayanan publik, pemenuhan sarana.

6. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses Pengelolaan Keuangan Daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 maupun berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, adanya regulasi baru dan perkembangan kondisi terkini diharapkan seluruh aparat yang terkait pengelolaan keuangan dapat meningkatkan pelayanan dan pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

7. Tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi :

- a. pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan di UKPBJ.

- b. Perkembangan regulasi Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah yang sangat dinamis.

- c. Peningkatan kompetensi SDM Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa
Peluang yang dimiliki adalah jumlah Personil Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota cukup memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di UKPBJ.

8. Tantangan yang dihadapi adalah terbitnya berbagai aturan baru dalam pemenuhan kebijakan terkait Perekonomian dan SDA yang harus segera disikapi oleh Pemerintah Daerah dengan cepat.

Peluang yang dimiliki adalah Pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan sistem layanan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi.

9. Tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi adalah perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan.

Belum terbangunnya komunikasi yang baik pada tiap bagian-bagian dalam urusan menjalankan mekanisme perencanaan di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

10. Tantangan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan untuk pencapaian visi dan misi daerah terutama terkait koordinasi dengan lembaga eksternal baik itu dengan instansi vertikal ataupun dengan lembaga-lembaga keagamaan. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan tugas menjadi terkendala.

Peluang yang dimiliki adalah dalam pelaksanaan tugas makin antusias masyarakat dalam menyambut program unggulan daerah terutama program satu Nagari satu rumah tahfizh. Disamping itu

juga antusiasnya masyarakat untuk meminta dana hibah untuk pengembangan masjid dan mushala serta lembaga-lembaga keagamaan.

e. Formulasi isu-isu penting dalam pelayanan Perangkat Daerah

1. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan merupakan Unit kerja yang memfasilitasi layanan keprotokolan, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi Pimpinan. tugas dan fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan melekat pada kegiatan Kepala Daerah. Perlu kiranya Pemerintah Daerah memperhatikan tugas dan fungsi protokol agar kedepannya setiap kegiatan Kepala Daerah terfasilitasi dengan baik sesuai dengan aturan keprotokolan. Selain itu, sudah seyogyanya pemerintah daerah memperhatikan khusus terkait anggaran pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, agar dapat bekerja optimal dalam memfasilitasi Kegiatan Kepala Daerah. Dikarenakan kegiatan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan melekat pada Kegiatan Kepala Daerah.
2. Formulasi isu-isu penting Bagian Umum berupa rekomendasi yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Penambahan anggaran untuk penyediaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah, kebutuhan sarana dan prasarana gedung kantor, kendaraan dinas operasional serta peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui diklat.
3. Bagian Hukum merupakan Unit kerja yang memfasilitasi layanan penyusun produk hukum, Bantuan Hukum dan Dokumentasi Informasi Produk Hukum. tugas dan fungsi Bagian Hukum melekat pada kegiatan Kepala Daerah. Perlu kiranya Pemerintah Daerah memperhatikan tugas dan fungsi Hukum agar kedepannya setiap kegiatan Kepala Daerah terfasilitasi dengan baik sesuai dengan aturan. Selain itu, sudah seyogyanya pemerintah daerah memperhatikan khusus terkait anggaran pada Bagian Hukum, agar dapat bekerja optimal dalam memfasilitasi Pelaksanaan Harmonisasi Produk-Produk Hukum Daerah yang harus berkoordinasi dengan instansi vertikal.
4. Bagian Hukum merupakan Unit kerja yang membutuhkan Pemenuhan Sumber Daya Manusia terhadap tenaga perancang Peraturan perundang-undangan.
5. Formulasi isu-isu penting Bagian Hukum adalah pemenuhan sarana prasarana untuk optimalisasi kegiatan di Bagian Hukum.
6. Bagian Perencanaan dan Keuangan merupakan Unit kerja yang mengelola keuangan di Sekretariat Daerah, dalam hal ini tugas dan fungsinya adalah kegiatan rutin yang ada di setiap OPD, formulasi dan rekomendasi serta catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam melaksanakan tata kelola dan pertanggung jawaban keuangan yang bersih dan akuntabel adalah mengoptimalkan penatausahaan keuangan dengan berbasis teknologi (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) dan Transaksi Non Tunai.
7. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan dibagian pengadaan barang dan jasa adalah :
 - a. Perlunya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dimulai dari tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima pengadaan.

- b. Prioritas belanja di SKPD yang bersumber dari APBD dilaksanakan melalui Katalog Elektronik.
8. Bagian organisasi merupakan Unit kerja yang memfasilitasi Penyusunan tujuan, sasaran, program dan kegiatan secara utuh dan komprehensif berdasarkan tugas dan fungsi, Refitalisasi peran Perangkat Daerah dalam manajemen pembangunan daerah, Perumusan pola hubungan kerja/sistem tata kerja pelaksanaan tugas dan fungsi, Peningkatan sinergi penyelenggaraan pemerintah dari level terendah hingga pusat, Peningkatan kapasitas SDM, Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana.
 9. Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Lima Puluh Kota adalah bagian yang melakukan koordinasi dengan instansi/dinas teknis yang berhubungan kebijakan perekonomian daerah dan kebijakan SDA.
Isu-isu strategis dihadapi oleh Bagian Perekonomian dan SDA saat ini dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Dinamisasi regulasi dan pedoman yang mengatur terkait kebijakan perekonomian dan kebijakan SDA yang harus disesuaikan dan diselaraskan dengan dengan aturan-aturan yang sebelumnya telah disusun.
 - b. Kuantitas dan Kapasitas SDM Bagian Perekonomian dan SDA yang masih kurang dan perlu ditingkatkan.
 - c. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
 - d. Belum optimalnya koordinasi seluruh stakeholders terkait untuk penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perekonomian dan SDA.
 10. Selanjutnya selain dari isu-isu tersebut diatas, dalam memformulasi suatu Rencana Kerja (Renja), Bagian Pemerintahan juga melihat dan didasarkan dari permasalahan yang terjadi terkait pada bagian Pemerintahan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Harmonisasi hubungan antar Satuan Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima puluh Kota.
 - b. Peningkatan Harmonisasi hubungan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.
 11. Dibagian Kesejahteraan Rakyat Untuk meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat maka perlu peningkatan beberapa komponen antara lain :
 - a. Peningkatan sumber daya manusia keagamaan
 - b. Peningkatan Infrastruktur dan kelembagaan keagamaan
 - c. Meningkatkan pengelolaan keuangan sosial yang bersumber dari zakat, infak dan sedekah.
 - d. Peningkatan SDM adat dan budaya
 - e. Peningkatan kelembagaan adat dan budaya.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap rancangan awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Rencana Kerja dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Pada akhirnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah ini juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Bab ini berisikan uraian mengenai perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Disini dijelaskan bahwa tidak terdapat

perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan OPD. Program, kegiatan, rumusan-rumusan serta besaran-besaran yang terdapat pada rancangan awal RKPD tidak terdapat perubahan. Karena program dan kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah bersifat Fasilitasi dan koordinasi yang rutin dilaksanakan.

Adapun hasil perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang tertuang dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	setda	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	28.310.261.895	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	setda	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	28.310.261.895	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Setda	Persentase tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	381.050.100,00	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Setda	Persentase tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	381.050.100,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Setda	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD	100%	16.393.448.559,00	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Setda	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	16.393.448.559,00	
3	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Setda	Persentase Tertib Administrasi barang milik daerah	100%	26.596.700,00	3 Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Setda	Persentase Tertib Administrasi barang milik daerah	100%	26.596.700,00	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Setda	Persentase tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0	4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Setda	Persentase tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	-	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Setda	Persentase pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.125.333.700,00	5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Setda	Persentase pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.125.333.700,00	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Setda	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100%	673.648.000,00	6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Setda	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100%	673.648.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.)		
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Setda	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	3.342.952.900,00	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Setda	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	3.342.952.900,00	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Setda	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100%	3.055.915.900,00	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Setda	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100%	3.055.915.900,00	
9	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Setda	Persentase terlaksananya administrasi keuangan dan operasional KDH	100%	821.175.336,00	9	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Setda	Persentase terlaksananya administrasi keuangan dan operasional KDH	100%	821.175.336,00	
10	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretaris Daerah	Setda	Persentase terpenuhinya fasilitasi kerumahtanggaan KDH, wakil KDH dan Sekda	100%	1.305.199.200,00	10	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretaris Daerah	Setda	Persentase terpenuhinya fasilitasi kerumahtanggaan KDH, wakil KDH dan Sekda	100%	1.305.199.200,00	
11	Penataan Organisasi	Setda	OPD yang memiliki dokumen Analisis jabatan persentase OPD yang sesuai tugas pokok dan fungsi	100%	152.340.300,00	11	Penataan Organisasi	Setda	OPD yang memiliki dokumen Analisis jabatan persentase OPD yang sesuai tugas pokok dan fungsi	100%	152.340.300,00	
12	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Setda	Persentase Pelaksanaan kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan	100%	1.032.601.200,00	12	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Setda	Persentase terfasilitasinya dan terlayannya kegiatan KDH dan WKDH	100%	1.032.601.200,00	
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda	Persentase terlaksananya koordinasinya Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	9.413.852.700,00	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda	Persentase terlaksananya koordinasinya bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	9.413.852.700,00		
13	Administrasi Tata Pemerintahan	Setda	Persentase terlaksananya koordinasi bidang pemerintahan	100%	163.313.000,00	13	Administrasi Tata Pemerintahan	Setda	Persentase terlaksananya koordinasi bidang pemerintahan	100%	163.313.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.)		
14	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Setda	Persentase kegiatan terkait dengan kesejahteraan rakyat yang terkoordinasi	1005	8.837.350.100,00	14	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Setda	Persentase kegiatan terkait dengan kesejahteraan rakyat yang terkoordinasi	100%	8.837.350.100,00	
15	Fasilitasi dan koordinasi hukum	Setda	Persentase pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi hukum	100%	249.286.000,00	15	Fasilitasi dan koordinasi hukum	Setda	Persentase pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi hukum	100%	249.286.000,00	
16	Fasilitasi Kerjasama daerah	Setda	Persentase pelaksanaan Kerjasama daerah	100%	163.903.600,00	16	Fasilitasi Kerjasama daerah	Setda	Persentase pelaksanaan Kerjasama daerah	100%	163.903.600,00	
3	Program Perekonomian dan pembangunan	Setda	Persentase terlaksananya koordinasi dan fasilitas perekonomian	100%	603.227.000,00	Program Perekonomian dan pembangunan	Setda	Persentase terlaksananya koordinasi dan fasilitas perekonomian	100%	603.227.000,00		
17	Pelaksanaan kebijakan perekonomian	Setda	Persentase terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang perekonomian	100%	140.972.000,00	17	Pelaksanaan kebijakan perekonomian	Setda	Persentase terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang perekonomian	100%	140.972.000,00	
18	Pemantauan kebijakan sumber daya alam	Setda	Persentase Pemantauan kebijakan sumber daya alam	100%	183.967.000,00	18	Pemantauan kebijakan sumber daya alam	Setda	Persentase Pemantauan kebijakan sumber daya alam	100%	183.967.000,00	
19	Pelaksanaan Administrasi pembangunan	Setda	Persentase pelaksanaan administrasi pembangunan daerah	100%	186.421.000,00	19	Pelaksanaan Administrasi pembangunan	Setda	Persentase pelaksanaan administrasi pembangunan daerah	100%	186.421.000,00	
20	Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Setda	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi SPSE sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku	94%	91.867.000,00	20	Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Setda	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi SPSE sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku	94%	91.867.000,00	
Total					38.327.341.595,00	Total					38.327.341.595,00	

Perbandingan antara rancangan awal RKPD Sekretariat Daerah dengan hasil analisis kebutuhan dilakukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata organisasi dan mendukung prioritas kepala daerah.

Rancangan awal biasanya disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD dan evaluasi tahun sebelumnya. Namun, melalui analisis kebutuhan, ditemukan kondisi aktual seperti kebutuhan penguatan koordinasi antarperangkat daerah, digitalisasi pelayanan administratif, atau peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan.

Proses ini penting dilakukan untuk:

- Menyesuaikan program dengan kebutuhan faktual,
- Mengoptimalkan penggunaan anggaran,
- Menyusun perencanaan yang berbasis kinerja dan data,
- Meningkatkan efisiensi dukungan terhadap fungsi strategis kepala daerah.

Dengan demikian, RKPD Sekretariat Daerah menjadi lebih responsif, akuntabel, dan selaras dengan tuntutan pelayanan pemerintahan yang dinamis.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakikatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan tinggi maupun Perangkat Daerah lainnya melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026
Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALAMAT LOKASI	VOLUME	CATATAN
1	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Jorong cinta maju nagari durian tinggi, kab. Lima puluh kota	1 Kelompok	Pengadaan alat qasidah rebana kelompok yasin muslimah
2	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Nagari muara paiti kecamatan kapur ix, kab. Lima puluh kota	1 Kelompok	Bantuan dana kelompok majelis taklim al-huda
3	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Nagari muara paiti kecamatan kapur ix, kab. Lima puluh kota	1 Kelompok	Bantuan dana kelompok yasin dan qasidah al-huda
4	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Jorong cinta maju nagari durian tinggi, kab. Lima puluh kota	1 Kelompok	Pengadaan alat qasidah rebana kelompok yasin khairul nisya
5	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Jorong kampung dalam nagari muaro paiti kec. Kapur ix, kab. Lima puluh kota	1 Kelompok	Bantuan satu set pengeras suara surau muhammad rasyid
6	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Jorong kampung dalam nagari muaro paiti kec. Kapur ix, kab. Lima puluh kota	1 Kelompok	Bantuan kelompok majelis taklim surau nurul iman

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALAMAT LOKASI	VOLUME	CATATAN
7	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Nagari muaro paiti kec. Kapur ix, kab. Lima puluh kota	1 Kelompok	Bantuan kelompok majelis taklim muslimin
8	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Nagari muaro paiti kec. Kapur ix, kab. Lima puluh kota	1 Kelompok	Bantuan kelompok majelis taklim caniago
9	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Nagari muaro paiti kec. Kapur ix, kab. Lima puluh kota	1 Kelompok	Bantuan kelompok sholawat marhaban dan qasidah rebana al-hidayah
10	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Nagari muaro paiti, kab. Lima puluh kota	1 Kelompok	Bantuan kelompok qasidah muslimin
11	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Nagari muaro paiti, kab. Lima puluh kota	1 Kelompok	Bantuan kelompok yasinan surau an-nur
12	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Nagari muaro paiti kecamatan kapur ix, kab. Lima puluh kota	1 Kelompok	Bantuan kelompok majelis taklim surau al-falah

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALAMAT LOKASI	VOLUME	CATATAN
13	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Nagari muaro paiti , kab. Lima puluh kota	1 Kelompok	Bantuan kelompok yasin pkk nagari muaro paiti
14	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Nagari muaro paiti, kab. Lima puluh kota	1 Kelompok	Bantuan kelompok yasin bundo kanduang
15	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Nagari muaro paiti, kab. Lima puluh kota	1 Kelompok	Bantuan kelompok yasin mesjid nurul huda
16	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Nagari tarantang , kab. Lima puluh kota	1 Kelompok	Bantuan mesjid almuttakin
17	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Nagari tarantang, kab. Lima puluh kota	1 Kelompok	Bantuan mesjid nurul yakin
18	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Jorong solok dalam nagari solok bio-bio, kab. Lima puluh kota	1 Kelompok	Bantuan musolah pitopang

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALAMAT LOKASI	VOLUME	CATATAN
19	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Nagari harau, kab. Lima puluh kota	1 Kelompok	Bantuan musolah nurul iman
20	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Nagari tarantang, kab. Lima puluh kota	1 Unit	Bantuan surau hj. Amuk
21	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Nagari harau, kab. Lima puluh kota	1 Unit	Bantuan musolah nurul yakin
22	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Nagari harau, kab. Lima puluh kota	1 Unit	Bantuan musolah nurul ikhlas
23	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Nagari harau, kab. Lima puluh kota	1 Kelompok	Bantuan kelompok yasin padang tarok
24	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Nagari harau, kab. Lima puluh kota	1 Kelompok	Bantuan kelompok yasin sarang banio

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALAMAT LOKASI	VOLUME	CATATAN
25	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Nagari tarantang , kab. Lima puluh kota	1 Kelompok	Bantuan kelompok yasin lubuk limpat
26	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Nagari solok bio-bio , kab. Lima puluh kota	1 Kelompok	Bantuan kelompok yasin sialang
27	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Nagari solok bio-bio , kab. Lima puluh kota	1 Kelompok	Bantuan kelompok yasin maju basamo
28	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Nagari solok bio-bio , kab. Lima puluh kota	1 Kelompok	Bantuan kelompok yasin bungo tanjuang
29	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Kecamatan harau, kab. Lima puluh kota	8 Kelompok	Bantuan kelompok yasin
30	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Kecamatan guguk dan mungka, kab. Lima puluh kota	20 Unit	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid
31	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Kecamatan guguk dan mungka, kab. Lima puluh kota	20 Unit	Bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALAMAT LOKASI	VOLUME	CATATAN
32	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Kecamatan guguk dan kecamatan mungka, kab. Lima puluh kota	20 Kelompok	Bantuan untuk kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : Kelompok Yasin, BMKT, Qasidah dll)
33	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Kecamatan mungka, kab. Lima puluh kota	15 Paket	Meningkatkan kegiatan kelompok keagamaan
34	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Bantuan pembangunan /rehabilitasi masjid	Kecamatan mungka, kab. Lima puluh kota	10 Unit	Masih terdapatnya masjid yang membutuhkan bantuan pembangunan
35	Bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla	Bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla	Kecamatan harau dan kecamatan payakumbuh, kab. Lima puluh kota	10 Unit	Peningkatan tempat ibadah
36	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Jorong i dan ii koto bangun, kec. Kapur ix, kab. Lima puluh kota	2 Paket	Masih perlunya diadakan lanjutan pembangunan masjid
37	Bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla	Bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla	Jorong iii koto bangun, kec. Kapur ix, kab. Lima puluh kota	1 Paket	Masih perlunya diadakan lanjutan pembangunan mushalla
38	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Jorong i, ii & iii koto bangun, kec. Kapur ix, kab. Lima puluh kota	3 Unit	Masih perlu dilanjutkan pembangunan masjid
39	Bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla	Bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla	Jorong i, ii koto bangun, kec. Kapur ix, kab. Lima puluh kota	2 Unit	Lanjutan pembangunan musholla

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALAMAT LOKASI	VOLUME	CATATAN
40	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Lubuak alai, kec. Kapurix, kab. Lima puluh kota	4 Kelompok	Bantuan majlis ta'lim
41	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Tanjung balik, kec. Pangkalan, kab. Lima puluh kota	2 Kelompok	Bantuan majlis ta'lim
42	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Kec. Pangkalan, kab. Lima puluh kota	5 Kelompok	Bantuan majlis ta'lim
43	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Jorong tobek panjang, kec. Payakumbuh, kab. Lima puluh kota	100 Set	Bantuan baju seragam kelompok yasin
44	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Jorong tobek panjang, kec. Payakumbuh, kab. Lima puluh kota	25 Set	Bantuan alat kesenian rebana
45	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Jorong tobek panjang, kec. Payakumbuh, kab. Lima puluh kota	50 Set	Bantuan Alqur'an dengan Huruf Besar untuk Kelompok Yasin Darul Ulum Saiyo
46	Bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla	Bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla	Tobek panjang, kec. Payakumbuh, kab. Lima puluh kota	1 Paket	Peningkatan sarana ibadah
47	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Masjid raya siamang bunyi nagari kubang, kab. Lima puluh kota	1 Unit	Masih terbatas dan kurang representatifnya bangunan masjid dan fasilitas mck

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALAMAT LOKASI	VOLUME	CATATAN
48	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Masjid raya pauh sangik nagari pauh sangik, kab. Lima puluh kota	1 Unit	Masih terbatas dan kurang representatif nya bangunan masjid dan fasilitas mck
49	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Masjid nurul falah jorong suayan randah nagari suayan, kab. Lima puluh kota	1 Unit	Masih terbatas dan kurang representatif nya bangunan masjid dan fasilitas mck
50	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Nagari koto baru simalanggan, kab. Lima puluh kota	1 Unit	Bantuan pembangunan /rehabilitasi tempat ibadah (masjid/ mushalla)
51	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Nagari koto baru simalanggan, kab. Lima puluh kota	10 Kelompok	Bantuan untuk Kelompok Qasidah
52	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional rumah tahfizh	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional rumah tahfizh	Nagari koto baru simalanggan, kab. Lima puluh kota	5 Unit	Bantuan pembangunan /rehabilitasi/ operasional rumah tahfizh
53	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Kecamatan guguk, kab. Lima puluh kota	3 Unit	Dibutuhkan bantuan biaya untuk melanjutkan pembangunan masjid
54	Bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla	Bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla	Kecamatan guguk, kab. Lima puluh kota	3 Unit	Masih terdapatnya mushalla yang membutuhkan bantuan pembangunan
55	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional lembaga pendidikan agama (tpq/mdta/suru)	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional lembaga pendidikan agama (tpq/mdta/suru)	Kecamatan guguk, kab. Lima puluh kota	3 Unit	Masih terdapatnya lembaga pendidikan agama (tpq,mdta,suru) yang membutuhkan bantuan pembangunan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALAMAT LOKASI	VOLUME	CATATAN
56	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Kecamatan guguk, kab. Lima puluh kota	5 Paket	Meningkatkan kegiatan kelompok keagamaan masyarakat seperti kelompok yasin, BKMT, Qasidah dll
57	Bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla	Bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla	Kecamatan luak, kecamatan lareh sago halaban, dan kecamatan situjuah limo nagari, kab. Lima puluh kota	15 Unit	Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana
58	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Kecamatan luak, kecamatan lareh sago halaban, dan kecamatan situjuah limo nagari, kab. Lima puluh kota	15 Unit	Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana
59	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional rumah tahfiz	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional rumah tahfiz	Rumah tahfiz umul quro talago, nagari vii koto talago, kecamatan guguk, kab. Lima puluh kota	1 Unit	Belum selesainya pembangunan rumah tahfiz
60	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional lembaga pendidikan agama (tpq/mdta/surau)	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional lembaga pendidikan agama (tpq/mdta/surau)	Tpa al-iman sholihan padang japang, nagari vii koto talago, kecamatan guguk, kab. Lima puluh kota	1 Unit	Kurangnya dana operasional bagi pendidikan agama tpq

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALAMAT LOKASI	VOLUME	CATATAN
61	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional lembaga pendidikan agama (tpq/mdta/surau)	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional lembaga pendidikan agama (tpq/mdta/surau)	Mdta aisyiyah padang jopang, nagari vii koto talago, kecamatan guguk, kab. Lima puluh kota	1 Unit	Kurangnya dana operasional bagi pendidikan agama mdta
62	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Kecamatan gunuang omeh, kab. Lima puluh kota	50 Orang	Bantuan seragam kelompok yasin
63	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Kecamatan gunuang omeh, kab. Lima puluh kota	1 Paket	Peningkatan sarana keagamaan
64	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional rumah tahfizh	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional rumah tahfizh	Kecamatan gunuang omeh, kab. Lima puluh kota	1 Unit	Rehabilitasi mda
65	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional rumah tahfizh	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional rumah tahfizh	Jorong talang anau kecamatan gunuang omeh, kab. Lima puluh kota	1 Paket	Bantuan untuk rumah tahfiz
66	Bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla	Bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla	Nagari gunuang malintang, kecamatan pangkalan koto baru, kab. Lima puluh kota	5 Unit	Belum optimalnya sarana dan prasarana
67	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Nagari gunuang malintang, kecamatan pangkalan koto baru, kab. Lima puluh kota	4 Unit	Belum optimalnya sarana dan prasarana
68	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Kecamatan suliki, kab. Lima puluh kota	1 Paket	Bantuan sarana keagamaan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALAMAT LOKASI	VOLUME	CATATAN
69	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Kecamatan bukik barisan, kab. Lima puluh kota	1 Paket	Bantuan masjid
70	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Kecamatan harau, kab. Lima puluh kota	10 Unit	Masih butuhnya bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid
71	Bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla	Bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla	Kecamatan harau, kab. Lima puluh kota	10 Unit	Masih butuhnya bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla
72	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional rumah tahfizh	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional rumah tahfizh	Kecamatan harau, kab. Lima puluh kota	2 Unit	Masih butuhnya bantuan pembangunan / rehabilitasi rumah tahfizh
73	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional lembaga pendidikan agama (tpq/mdta/surau)	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional lembaga pendidikan agama (tpq/mdta/surau)	Kecamatan harau, kab. Lima puluh kota	2 Unit	Masih butuhnya bantuan pembangunan / rehabilitasi tpq/mdta/surau
74	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Kecamatan harau, kab. Lima puluh kota	10 Kelompok	Masih adanya kebutuhan kelompok yang harus dipenuhi
75	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional rumah tahfizh	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional rumah tahfizh	Banda dalam, sijutuah limo nagori, kab. Lima puluh kota	1 Paket	Bantuan untuk fasilitas tpa dan lembaga pengajian
76	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Tengah padang, situjuah limo nagori, kab. Lima puluh kota	50 Orang	Bantuan Baju Kelompok Yasin dan Selawat

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALAMAT LOKASI	VOLUME	CATATAN
77	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional lembaga pendidikan agama (tpq/mdta/surau)	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional lembaga pendidikan agama (tpq/mdta/surau)	Tengah padang, situjuah limo nagori, kab. Lima puluh kota	1 Paket	Pembangunan gedung paud
78	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Banda dalam situjuah limo nagori, kab. Lima puluh kota	30 Set	Alat kesenian qasidah
79	Bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla	Bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla	Nagari taram, kab. Lima puluh kota	2 Unit	Bantuan pembangunan dan regab musholla di nagari taram
80	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional rumah tahfizh	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional rumah tahfizh	Kecamatan harau, kab. Lima puluh kota	3 Unit	Bantuan pembangunan/rehabilitas/operasional rumah tahfizh di kecamatan harau
81	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Nagari taram kecamatan harau, kab. Lima puluh kota	5 Kelompok	Bantuan pakaian muslimah seragam untuk kelompok yasin se nagari taram
82	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Kecamatan harau dan kecamatan payakumbuh, kab. Lima puluh kota	5 Unit	Rehab tempat ibadah
83	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional rumah tahfizh	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional rumah tahfizh	Nagari koto baru simalangga, kab. Lima puluh kota	1 Paket	Kurangnya bangunan untuk pendidikan di rumah tahfidz
84	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional rumah tahfizh	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional rumah tahfizh	Nagari gurun, kab. Lima puluh kota	1 Paket	Pembangunan rumah tahfizh

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALAMAT LOKASI	VOLUME	CATATAN
85	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Kecamatan akabiluru, guguk, mungka., kab. Lima puluh kota	10 Unit	Pembangunan dan rehabilitasi bangunan masjid
86	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional lembaga pendidikan agama (tpq/mdta/suru)	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional lembaga pendidikan agama (tpq/mdta/suru)	Jorong boncah, nag. Batu balang, kec. Harau, kab. Lima puluh kota	1 Unit	Masih butuhnya bantuan pembangunan / rehabilitasi tpq istiqlal
87	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Se-kecamatan harau, kab. Lima puluh kota	20 Unit	Masih butuhnya bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid
88	Bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla	Bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla	Se-kecamatan harau, kab. Lima puluh kota	22 Unit	Masih butuhnya bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla
89	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Nagari talang maur, kab. Lima puluh kota	1 Unit	Pembangunan tempat berwudhu
90	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Nagari kubang, kab. Lima puluh kota	1 Unit	Pembangunan dan atau rehabilitasi
91	Bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla	Bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla	Musholla al-abrar air putih, sarilamak kecamatan harau, kab. Lima puluh kota	1 Paket	Bantuan untuk pembangunan dan rehab tempat wuduk serta ruangan mushalla
92	Bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla	Bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla	Mushalla baburrahman air putih, sarilamak kecamatan harau, kab. Lima puluh kota	1 Paket	Bantuan untuk pembangunan dan rehab tempat wuduk serta ruangan mushalla

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALAMAT LOKASI	VOLUME	CATATAN
93	Bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla	Bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla	Mushalla baitussalam air putih , sarilamak kec harau, kab. Lima puluh kota	1 Paket	Bantuan untuk pembangunan dan rehab tempat wuduk serta ruangan mushalla
94	Bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla	Bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla	Mushalla nurul yakin kayu godang tanjung pati, kenagarian koto tuo kec harau, kab. Lima puluh kota	1 Paket	Bantuan untuk pembangunan dan rehab tempat wuduk serta ruangan mushalla
95	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Koto bangun, kecamatan kapur ix, kab. Lima puluh kota	30 Set	Bantuan rebana
96	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Situjuah banda dalam dan situjuah gadang, kab. Lima puluh kota	10 Unit	Bantuan masjid
97	Bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla	Bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla	Situjuah banda dalam dan situjuah gadang, kab. Lima puluh kota	10 Unit	Bantuan musola
98	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional lembaga pendidikan agama (tpq/mdta/ surau)	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional lembaga pendidikan agama (tpq/mdta/ surau)	Situjuah banda dalam dan situjuah gadang, kab. Lima puluh kota	10 Unit	Bantuan untuk tpq/mda/surau
99	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Situjuah Banda Dalam dan Situjuah Gadang, Kab. Lima Puluh Kota	10 Paket	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALAMAT LOKASI	VOLUME	CATATAN
100	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Jorong air putih kenagarian sarilmak kecamatan harau, kab. Lima puluh kota	1 Kelompok	Perlu bantuan seragam untuk kelompok yasin al-abrar aia putiah
101	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Jorong air putih kenagarian sarilmak kecamatan harau., kab. Lima puluh kota	1 Kelompok	Bantuan seragam untuk kelompok yasin ar-rahmah aie putiah
102	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Jorong air putih kenagarian sarilmak kecamatan harau.,, kab. Lima puluh kota	1 Kelompok	Tidak ada seragam baru untuk kelompok yasin al-husna aie putiah
103	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Jorong air putih kenagarian sarilmak kecamatan harau.,,, kab. Lima puluh kota	1 Kelompok	Butuh bantuan seragam untuk kelompok yasin simpang koto aie putiah,...
104	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Jorong. Air putih kenagarian sarilmak. Kecamatan harau., kab. Lima puluh kota	1 Kelompok	Butuh seragam baru kelompok yasin nurul huda air putih
105	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Jor air putih ken sarilmak kec harau, kab. Lima puluh kota	1 Kelompok	Belum ada seragam baru untuk yasin hasanah ketinggian
106	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Guguk viii koto kecamatan guguk, kab. Lima puluh kota	5 Kelompok	Butuh seragam baru untuk kelompok yasin. Lima kelompok yasin di nagari guguk viii koto

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALAMAT LOKASI	VOLUME	CATATAN
107	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Se-kecamatan lareh sago halaban, kab. Lima puluh kota	10 Unit	Masih butuhnya bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid
108	Bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla	Bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla	Se-kecamatan lareh sago halaban, kab. Lima puluh kota	10 Unit	Masih butuhnya bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla
109	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional rumah tahfizh	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional rumah tahfizh	Se-kecamatan lareh sago halaban, kab. Lima puluh kota	2 Unit	Masih butuhnya bantuan pembangunan / rehabilitasi rumah tahfizh
110	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional lembaga pendidikan agama (tpq/mdta/surau)	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional lembaga pendidikan agama (tpq/mdta/surau)	Se-kecamatan lareh ssago halaban, kab. Lima puluh kota	2 Unit	Masih butuhnya bantuan pembangunan / rehabilitasi operasional lembaga pendidikan agama (tpq/mdta/surau)
111	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Se-kecamatan lareh sago halaban, kab. Lima puluh kota	10 Kelompok	Memenuhi kebutuhan kelompok
112	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Nagari sungai kamuyang , kab. Lima puluh kota	25 Kelompok	Bantuan klpk. Yasin di nagari sungai kamuyang
113	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Nagari sungai kamuyan, kab. Lima puluh kota	7 Paket	Bantuan Mesjid dan Mushola Di Nagari Sungai Kamuyang

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALAMAT LOKASI	VOLUME	CATATAN
114	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Kecamatan guguk, kab. Lima puluh kota	1 Unit / tahun	Perlunya bagi masjid
115	Bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla	Bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla	Kecamatan guguk, kab. Lima puluh kota	1 Unit / tahun	Perlunya bagi mushalla
116	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional rumah tahfiz	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional rumah tahfiz	Kecamatan guguk, kab. Lima puluh kota	1 Unit / tahun	Perlunya bagi rumah tahfiz
117	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional lembaga pendidikan agama (tpq/mdta/surau)	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional lembaga pendidikan agama (tpq/mdta/surau)	Kecamatan guguk, kab. Lima puluh kota	1 Unit / tahun	Perlunya bagi mdta
118	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Kecamatan guguk, kab. Lima puluh kota	1 Kelompok / tahun	Perlunya bagi kelompok keagamaan masyarakat (seperti kelompok yasin, bkmt, qasidah, dll)
119	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Kecamatan lareh sago halaban, kab. Lima puluh kota	10 Unit	Banyaknya mesjid yang rusak dan masih perlu perbaikan
120	Bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla	Bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla	Kecamatan lareh sago halaban, kab. Lima puluh kota	16 Unit	Banyaknya musholla yang rusak dan masih perlu perbaikan
121	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Kecamatan lareh sago halaban, kab. Lima puluh kota	40 Kelompok	Banyaknya kelompok keagamaan yang masih kurang dalam sarana dan prasana untuk melangsungkan kegiatan keagamaan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALAMAT LOKASI	VOLUME	CATATAN
122	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Koto tengah simalanggan, kec. Payakumbu, kab. Lima puluh kota	1 Paket	Bantuan masjid al ikhlas jorong tambun ijuk
123	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Kec. Bukik barisan, suliki, gunuang omeh, kab. Lima puluh kota	1 Unit / tahun	Perlunya bagi masjid
124	Bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla	Bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla	Kec. Bukik barisan, suliki, gunuang omeh, kab. Lima puluh kota	1 Unit / tahun	Perlunya bagi mushalla
125	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional rumah tahfizh	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional rumah tahfizh	Kec. Bukik barisan, suliki, gunuang omeh, kab. Lima puluh kota	1 Unit / tahun	Perlunya bagi rumah tahfizh
126	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional lembaga pendidikan agama (tpq/mdta/ surau)	Bantuan pembangunan / rehabilitasi / operasional lembaga pendidikan agama (tpq/mdta/ surau)	Kec. Bukik barisan, suliki, gunuang omeh, kab. Lima puluh kota	1 Unit / tahun	Perlunya bagi tpq/ mdt/ surau
127	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Kec. Bukik barisan, suliki, gunuang omeh, kab. Lima puluh kota	1 Kelompok / tahun	Perlunya bagi kelompok keagamaan masyarakat (seperti kelompok yasin, bkmt, qasidah, dll)
128	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Guguak viii koto, kecamatan guguak, kab. Lima puluh kota	5 Paket	Perlu dana hibah bantuan untuk perbaikan ruangan masjid dan tempat berwudu di lima masjid kenagarian guguak viii koto

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALAMAT LOKASI	VOLUME	CATATAN
129	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Nagari durian tinggi kecamatan kapur ix, kab. Lima puluh kota	11 Paket	Kurang nya anggaran untuk rehabilitasi mesjid raya durian , mesjid taqwa ronah, mesjid nurul ihsan, musholah kampung ambai, mushola nurul huda, mushala ansharullah, musholah bawah manggis, mushola arrahman, mushola darusalam, mushola annur di nagari durian tinggi
130	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Nagari koto lamo, kab. Lima puluh kota	5 Paket	Kurangnya anggaran untuk mesjid nurul huda, nurul ikhsan, nur hidayah, nurul iman, darus salam
131	Bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla	Bantuan pembangunan / rehabilitasi mushalla	Nagari koto lamo kecamatan kapur ix, kab. Lima puluh kota	18 Paket	Kurangnya anggaran untuk mushola annur, al mubarakah, baitul amal, nurul ikwan, surau suluk, baitul jannah, at-taqwa, nurul yakinas-salam, darussalam, roudatul jannah, al huda, mutmainnah, al barokah, hidayah, hidayah, nurul hidayah, dan nurul huda
132	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Bantuan pembangunan / rehabilitasi masjid	Nagari lubuak alai, kab. Lima puluh kota	4 Paket	Kurangnya dana untuk mesjid iatiqomah, mukhsinin, nurul iman, dan syamrothul huda di nagari lubuak alai

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALAMAT LOKASI	VOLUME	CATATAN
133	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Jorong aie angek nagari koto tinggi kecamatan gunuang omeh kabupaten lima puluh kota, kab. Lima puluh kota	300 Meter	Bantuan mesjid (drainase)
134	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Jorong pua data nagari koto tinggi kecamatan gunuang omeh kabupaten lima puluh kota , kab. Lima puluh kota	1 Paket	Pengadaan cctv mesjid sholihin pua data
135	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Jorong pua data nagari koto tinggi kecamatan gunuang omeh kabupaten lima puluh kota, kab. Lima puluh kota	1 Paket	Pembangunan mck mdta nurush sholihin
136	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Jorong sungai dadok nagari koto tinggi kecamatan gunuang omeh kabupaten lima puluh kota, kab. Lima puluh kota	1 Paket	Pembangunan tempat wudhuk mesjid muhajirin jorong sungai dadok
137	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Nagari koto tinggi, kab. Lima puluh kota	20 Kelompok	Sarana Prasarana Mejlis Ta'klm Sekenagari an Koto Tinggi

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ALAMAT LOKASI	VOLUME	CATATAN
138	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Kecamatan gunung omeh, Kab. Lima Puluh Kota	20 Unit	Bantuan untuk Masjid
139	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Kecamatan gunung omeh, Kab. Lima Puluh Kota	20 Unit	Bantuan untuk Mushola
140	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Bantuan untuk Kelompok Keagamaan Masyarakat (spt : kelompok Yasin, BKMT, Qasidah dll)	Jorong koto panjang nagari pandam gadang kecamatan gunuang omeh kabupaten lima puluh kota, kab. Lima puluh kota	1 Paket	Pengadaan cctv mesjid jihad koto panjang nagari pandam gadang

Untuk Program dan Kegiatan dari pemangku kepentingan yang terbanyak adalah pada Pokir berupa Hibah Uang untuk kelompok Masyarakat yang beraktifitas dibidang Keagamaan berupa Kelompok Yasin, selanjutnya Hibah Kepada Masjid dan Musholla, Kelompok Shalawat, Kelompok Rebana, Majelis Taklim, Surau dan TPQ yang tersebar di berbagai Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Penetapan kebijakan penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota selain mengacu pada kebijakan Pemerintah Provinsi, Dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, bahwasanya Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam RPJMN yang dijabarkan dalam Renstra Kementarian/Lembaga dan RPJMD Tahun 2025-2029.

Demi menjaga keberlangsungan sistem perencanaan pembangunan nasional mensinergikan perencanaan di tingkat pusat dan daerah untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling memperkuat dan mempercepat dalam pencapaian target yang diinginkan. Untuk itu, Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun berikutnya berdasarkan telaahan terhadap prioritas nasional dalam rancangan awal RKPD 2025.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah

Rencana Kerja ini mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 yaitu :

A. Tujuan

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pelayanan publik, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta Meningkatkan peran masyarakat dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya.

B. Sasaran

1. Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum.
2. Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan.
3. Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pelayanan publik, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta Meningkatkan peran masyarakat dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang administrasi umum	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	62.98	64.28	65.78	66.71	68.93	70.76
			Indeks Pelayanan Publik	4.31	4.35	4.40	4.44	4.49	4.54
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	90%	90%	90%	90%	90%	90%
			Indeks Kepuasan Layanan Pimpinan (IKLP)	95	95	95	95	95	95
			Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	62.98	64.28	65.78	66.71	68.93	70.76
		Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase Capaian Pengendalian dan pelaporan administrasi pembangunan	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00
			Persentase Kebijakan Pengelolaan Perekonomian yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Indeks Tata Kelola Kelola pengadaan	78,60	81,50	82,50	84,50	86,40	88,40
		Meningkatnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Indeks ABS-SBK	2,10	2,14	2,18	2,22	2,26	2,30
			Indeks Reformasi Hukum	70	73	76	79	82	85
			Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2,90	2,92	2,94	2,96	2,98	3,00

3.3. Program dan Kegiatan (di Tahun 2025 dalam Renstra)

Program dan kegiatan Sekretariat Daerah yang dimuat dalam Rencana Kerja tahun 2026 dimaksudkan untuk mendukung Visi dan Misi Bupati terpilih, sementara nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri No. 90 Tahun 2019.

Tabel. 3.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
SEKRETARIAT DAERAH		
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		4 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		7 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		3. Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
	9 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
	10 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11 Pengadaan Pakaian dinas ASN
		12 Pengadaan pakaian daerah ASN
		13 Pengadaan pakaian olah raga ASN
	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	14 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		15 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		16 Fasilitasi Kunjungan Tamu

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		17 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		18 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		20 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		21 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		22 Pengadaan Meubeleurn
		23 Pengadaan Tanah Rumah Dinas
		24 Pengadaan rumah dinas kepala daerah
	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		26 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		27 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		28 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		30 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		31 Pemeliharaan Mebel
		32 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		33 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		34 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		35 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		36 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	9. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	37 Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH/wakil KDH
		38 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		39 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		40 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	10. Fasilitasi Kerumahan tanggaa Sekretariat Daerah	41 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
		42 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
		43 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
	11. Penataan Organisasi	44 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
		45 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		46 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
		47 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		48 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
	12. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	49 Fasilitasi Keprotokolan
		50 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
		51 Pendokumentasian Tugas Pimpinan
	II. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	13. Administrasi Tata Pemerintahan
53 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		
54 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		
14. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		55 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
15. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		56 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
		57 Fasilitasi Bantuan Hukum
		58 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
16. Fasilitasi Kerjasama Daerah		59 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		60 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
		61 Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama
III. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	17. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	62 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
		63 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
		64 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikrokecil
	18. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	65 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
		66 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
		67 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
	19. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	68 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		69 Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
		70 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
	20. Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	71 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
		72 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
		73 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Adapun identifikasi permasalahan untuk penentuan Program Prioritas pada Sekretariat Daerah berdasarkan Analisa data capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas
Kabupaten Lima Puluh Kota
(Analisa data capaian kinerja Tahun 2024)

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1.	IKU KDH indeks ABS-SBK	Tercapai	-	Terlaksananya aktifitas keagamaan adat dan budaya diseluruh nagari
2.	IKU kepala OPD Tahun 2024			
	1. Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi bidang Pemerintahan	Tercapai	-	Koordinasi dan Fasilitasi bidang Pemerintahan
	2. indeks ABS-SBK	Tercapai	-	Terlaksananya aktifitas keagamaan adat dan budaya diseluruh nagari
	3. Persentase jumlah produk Hukum Daerah yang dipublikasikan melalui JDIH	Tercapai	-	produk Hukum Daerah yang dipublikasikan melalui JDIH
	4. Persentase Peningkatan Koordinasi Sektor Perekonomian (%)	Tercapai	-	Peningkatan Koordinasi Sektor Perekonomian
	5. Persentase OPD dengan Pecapaian Program dan Kegiatan diatas 80%	Tercapai	-	OPD dengan Pecapaian Program dan Kegiatan diatas 80%
	6. Persentase Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi SPSE yang sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku	Tercapai	-	Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi SPSE yang sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku
	7. Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi Baik	Tercapai	-	Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi Baik
	8. Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	Tercapai	-	Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
	9. Terwujudnya Fasilitasi Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sesuai Standar Keprotokolan Yang Berlaku dan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Tercapai	-	Fasilitasi Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sesuai Standar Keprotokolan Yang Berlaku dan Pendokumentasian Tugas Pimpinan
	10. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah yang tersedia	Tercapai	-	Dokumen Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah yang tersedia

Pada Tahun 2024 rasio tempat ibadah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan nilai 1: 251, hal ini berarti bahwa untuk 1 Masjid/Mushalla untuk 251 orang penduduk. Pada Tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat sebanyak 389.837 Jiwa, sedangkan jumlah rumah ibadah sebanyak 1.555 unit yang terdiri dari 435 unit Masjid dan 1.120 Mushalla. Sedangkan tempat ibadah selain umat Islam tidak ada karena jumlah penduduk muslim di Kabupaten Lima Puluh Kota melebihi 98%.

Dari data di atas disimpulkan bahwa ketersediaan tempat ibadah di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah sesuai dengan kebutuhan dibanding dengan jumlah penduduk. Sedangkan kondisi rumah ibadah rata-rata sudah cukup bagus dan memenuhi standar. Hal ini karena kepedulian masyarakat yang cukup tinggi terhadap kondisi rumah ibadah tersebut. Disamping itu perhatian Pemerintah Daerah juga cukup bagus, dimana setiap tahun melalui anggaran hibah, Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan untuk rumah ibadah di setiap Nagari. Pada Tahun 2023 Anggaran hibah yang dialokasikan mencapai Rp. 1.040.000.000,-

Secara umum tidak ada permasalahan pada rumah ibadah, khususnya yang terkait dengan bangunan fisik, namun perlu perhatian Pemerintah bersama masyarakat terutama pada WC dan sanitasi. Dimana pada sebagian nagari, WC di tempat ibadah dijadikan WC komunal yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu perlu perhatian dan pembinaan dari Pemerintah Nagari, Kecamatan dan Kabupaten agar WC dan sanitasi di tempat ibadah tersebut sesuai dengan standar kesehatan.

Pada Tahun 2025 Bagian Umum ada penambahan 1 Kegiatan Baru yaitu Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dimana terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan baru yaitu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKP. Penambahan Sub. Kegiatan ini bertujuan supaya lebih tertibnya Penatausahaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pada Tahun 2024 Bagian Perencanaan dan Keuangan ada penambahan 1 Kegiatan Baru yaitu Perencanaan, Penganggaran dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dimana terdapat 2 (dua) Sub Kegiatan baru yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD. Penambahan kegiatan baru dan Sub. Kegiatan baru ini bertujuan supaya lebih terjaminnya kelancaran tersediannya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Pada Tahun 2024 Bagian Perekonomian ada pengurangan 2 Sub. Kegiatan yaitu Sub. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD dan juga Sub. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD. Pengurangan 2 Sub. Kegiatan tersebut karna alokasi dana dibagikan perekonomian yang minim dan dapat di handle dalam satu kegiatan.

Seluruh pendanaan kegiatan masing-masing bagian di Sekretariat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2026, yang dapat dilihat pada Lampiran Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Tabel Rencana Program dan Kegiatan menurut Permendagri No 90 Tahun 2019 pada dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 Sekretariat Daerah ini.

Selain itu, program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah juga dikelompokkan berdasarkan pendukung terhadap prioritas Kabupaten, seperti Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya SAKATO BERMARTABAT, Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih SAKATO BERINTEGRITAS. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah pendukung prioritas kabupaten secara lengkap dapat dibaca pada tabel 3.4 di halaman berikut ini:

Tabel 3.4
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah
Pendukung Prioritas Kabupaten

No	Prioritas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Prioritas pencapaian Misi 1. Pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
2.	Program Prioritas pencapaian Misi 2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
3.	Program Prioritas pencapaian Misi 3. Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

No	Prioritas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
4.	PPD 1: Pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
5.	PPD 4: Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perlindungan sosial	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

Berdasarkan tabel. 3.3 di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendukung Prioritas Kabupaten yang ada di Sekretariat Daerah terdiri dari: (1) Program Prioritas pencapaian Misi 1. Pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama yang terdiri dari 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub Kegiatan dengan total pagu Rp. 8.837.350.100,-; (2) Program Prioritas pencapaian Misi 2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih terdiri dari 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan total pagu Rp. 27.347.600,-; (3) Program Prioritas pencapaian Misi 3. Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif terdiri dari 1 program, 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan total pagu Rp. 8.837.350.100,-; (4) PPD 1: Pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama terdiri dari 1 program, 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan total pagu Rp. 8.837.350.100,-; (5) PPD 4: Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perlindungan sosial terdiri dari 1 program, 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan total pagu Rp. 8.837.350.100,-;

Program dan kegiatan Sekretariat Daerah yang dimuat dalam Rencana Kerja tahun 2026 juga dapat disajikan dalam bentuk tabel seperti berikut ini :

Tabel 3.5
Rumusan Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
Dan perkiraan maju Tahun 2027
Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	8	8	9	12	13	14
		SEKRETARIAT DAERAH				38.327.341.595				63.605.930.000
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				38.327.341.595				63.605.930.000
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH				38.327.341.595				63.605.930.000
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase pelaksanaan urusan pemerintah daerah</i>		100 %	28.310.261.895				52.500.000.000
A.	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan perangkat daerah</i>	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100 %	381.050.100	Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum	Iku Sekretariat Daerah	-	571.575.150

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	8	8	9	12	13	14
B.	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan OPD</i>	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100 %	16.393.448.559	Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Tambahan, Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK; Pendanaan Asli Daerah; Pendapatan Bagi Hasil Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya	Iku Sekretariat Daerah	-	15.092.375.162
C.	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase tertib administrasi barang milik daerah</i>	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100 %	26.596.700	Pendapatan Bagi Hasil	Iku Sekretariat Daerah	-	79.895.050
D.	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100 %	0,00	-	Iku Sekretariat Daerah	-	403.500.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	8	8	9	12	13	14
E.	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah</i>	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100 %	1.125.333.700	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Bagi Hasil.	Iku Sekretariat Daerah	-	1.985.288.550
F.	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan</i>	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100 %	673.648.000	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Bagi Hasil;	Iku Sekretariat Daerah	-	15.320.045.702
G.	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan jasa penunjang pemerintah daerah</i>	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100 %	3.342.952.900	Pendapatan Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah	Iku Sekretariat Daerah	-	5.263.929.350
H.	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase barang milik daerah dan berkondisi baik</i>	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100 %	3.055.915.900	DBH, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Bagi Hasil	Iku Sekretariat Daerah	-	8.610.795.850
I.	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	<i>Persentase terlaksannya administrasi keuangan dan operasional KDH</i>	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100 %	821.175.336	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Bagi Hasil	Iku Sekretariat Daerah	-	871.172.436

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	8	8	9	12	13	14
J.	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	<i>Persentase terpenuhinya fasilitasi kerumahtanggaan KDH, Wakil KDH dan SEKDA</i>	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100 %	1.305.199.200	Dana Alokasi Umum , Pendapatan Asli Daerah , Pendapatan Bagi Hasil		-	1.957.798.800
K.	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	<i>OPD yang memiliki dokumen analisis jabatan persentase OPD yang sesuai tugas pokok dan fungsi</i>	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100 %	152.340.300	Dana Alokasi Umum , Pendapatan Asli Daerah	Iku Sekretariat Daerah	-	228.510.450
L.	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	<i>Terfasilitasi dan terlayannya kegiatan KDH/ WKDH</i>	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100 %	1.032.601.200	Dana Alokasi Umum	Iku Sekretariat Daerah	-	2.115.113.500
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>Persentase terlaksananya koordinasi bidang kesejahteraan rakyat</i>		100 %	9.413.852.700			-	10.265.230.000
A.	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	<i>Persentase terlaksananya koordinasi bidang pemerintahan</i>	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100 %	163.313.000	Dana Alokasi Umum		-	199.673.670

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	8	8	9	12	13	14
B.	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	<i>Persentase kegiatan terkait dengan kesejahteraan rakyat yang terkoordinasi</i>	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100 %	8.837.350.100	Dana Alokasi Umum , DBH, Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya bidang kesehatan, Pendapatan Asli Daerah , Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya	Iku Sekretariat Daerah	-	9.531.390.983
C.	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	<i>Persentase pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi hukum</i>	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100 %	249.286.000	Dana Alokasi Umum , Pendapatan Asli Daerah	Iku Sekretariat Daerah	-	300.300.240
D.	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	<i>Persentase pelaksanaan fasilitasi kerjasama daerah</i>	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100 %	163.903.600	Dana Alokasi Umum , Pendapatan Asli Daerah	Iku Sekretariat Daerah	-	233.865.107
3.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<i>Persentase terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang perekonomian</i>		100 %	603.227.000			-	840.700.000
A.	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	<i>Persentase terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang perekonomian</i>	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100 %	140.972.000	Dana Alokasi Umum	Iku Sekretariat Daerah	-	192.502.546

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	8	8	9	12	13	14
B.	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	<i>Persentase pelaksanaan pembangunan daerah</i>	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100 %	183.967.000	Dana Alokasi Umum , Pendapatan Asli Daerah	Iku Sekretariat Daerah	-	224.905.410
C.	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	<i>Persentase pengadaan barang jasa melalui aplikasi SPSE sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</i>	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100 %	186.421.000	Dana Alokasi Umum , Pendapatan Asli Daerah	Iku Sekretariat Daerah	-	255.653.412
D.	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	<i>Tersusunnya laporan sebagai penunjang kegiatan</i>	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	100 %	91.867.000	Dana Alokasi Umum	Iku Sekretariat Daerah	-	167.638.632
J U M L A H						38.327.341.595				63.605.930.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026 mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026 dan Renstra Sekretariat Daerah tahun 2021-2026. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Selanjutnya penyempurnaan indikator kinerja sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan terakhir Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan demikian Sekretariat Daerah mempunyai Rencana Kerja dan sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2026, dan Prakiraan Maju Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 merupakan perwujudan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya akan sangat mendukung proses penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran pemerintah, menindaklanjuti hal tersebut Sekretariat Daerah telah melakukan pemetaan terhadap Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026.

Table 4.1

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) SEKRETARIAT DAERAH
KAB. LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DAERAH						38.327.341.595,00							63.605.930.000	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						38.327.341.595,00							63.605.930.000	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						38.327.341.595,00							63.605.930.000	
1,	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase pelaksanaan urusan pemerintah daerah</i>	-			100 %	28.310.261.895,00						-	52.500.000.000	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan perangkat daerah</i>	-			100 %	381.050.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.575.150	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				5 Dokumen	204.188.300,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		306.282.450	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				4 Dokumen	176.861.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		265.292.700	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan OPD</i>	-			100 %	16.393.448.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.092.375.162	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				126 Orang/bulan	16.195.579.059,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-	-		14.669.986.962	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				120 Dokumen	84.352.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		252.112.100	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	20.848.400,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		31.272.600	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>				17 Laporan	62.099.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		93.149.400	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	30.569.400,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.854.100	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase tertib administrasi barang milik daerah</i>	-			100%	26.596.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.895.050	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				5 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				5 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				6 Laporan	26.596.700,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		39.895.050	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	-			100%	0,00							403.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
		Pengadaan Pakaian dinas ASN														
			<i>Jumlah Pakaian dinas ASN yang tersedia</i>				269 stel	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		134.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
		Pengadaan pakaian daerah ASN														
			<i>Jumlah Pakaian daerah ASN yang tersedia</i>				269 stel	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		134.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
		Pengadaan pakaian olah raga ASN														
			<i>Jumlah Pakaian olah raga ASN yang tersedia</i>				269 stel	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		134.500.000	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah</i>	-			100 %	1.125.333.700,00							1.985.288.550	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	78.280.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		117.420.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	30.479.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.178.500	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	674.767.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.012.151.40000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	301.808.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		750.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				10 Dokumen	39.999.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		59.998.650	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Presentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan</i>	-			100 %	673.648.000,00			-	-	-		15.320.045.702	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				4 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.500.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				4 Unit	16.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.000.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit	657.648.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.320.045.702	SEKRETARIAT DAERAH
		Pengadaan Meubeleu														
			<i>Jumlah Meubeleu yang tersedia</i>				300 unit		Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)					1.000.000.000	
		Pengadaan Tanah Rumah Dinas														
			<i>Jumlah Meubeleu yang tersedia</i>				1 persil		Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)					3.500.000.000	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Pesentase ketersediaan jasa penunjang pemerintah daerah</i>	-			100 %	3.342.952.900,00			-	-	-		5.263.929.350	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		257.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Laporan	768.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.152.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 Laporan	70.808.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		106.212.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1 Laporan	2.499.144.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.748.717.350	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dan berkondisi baik	-			100%	3.055.915.900,00			-	-	-		8.610.795.850	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					6 Unit	251.850.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		377.775000	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				72 Unit	1.101.425.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.652.137.500	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				18 Unit	16.231.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL	-	-	-		24.346.500	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				4 Unit	89.813.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		134.719.500	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	488.441.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	216.099.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		324.148.500	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				30 Unit	880.833.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.80.833.000	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah														
			<i>Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi</i>				10 Ha	11.223.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		16.835.850	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	<i>Persentase terlaksananya administrasi keuangan dan operasional KDH</i>	-			100 %	821.175.336,00			-	-	-	-	871.172.436	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				2 Orang /Bulan	176.052.436,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		176.052.436,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				20 Paket	195.120.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		195.120.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				4 Orang	50.002.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				2 Orang/Bulan	400.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	<i>Persentase terpenuhinya fasilitas kerumahtangaan KDH, Wakil KDH dan SEKDA</i>	-			100 %	1.305.199.200,00			-	-	-	-	1.957.798.800	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</i>				3 Paket	515.557.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	773.335800	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				2 Paket	284.621.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	426.931.500	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</i>				2 Paket	505.021.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	757.531.500	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	<i>OPD yang memiliki dokumen analisis jabatan persentase OPD yang sesuai tugas pokok dan fungsi</i>	-			100 %	152.340.300,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak		-	-	-	-	228.510.450	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i>				5 Dokumen	28.812.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	43.218.300	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>				2 Laporan	27.347.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	41.021.400	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</i>				1 Dokumen	33.255.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	49.882.500	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>				1 Dokumen	38.847.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		58.270.500	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</i>				2 Dokumen	24.078.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		36.117.750	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	<i>Terfasilitasi dan terlayannya kegiatan KDH/WKDH</i>	-			100 %	1.032.601.200,00			-	-	-	-	2.115.113.500	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan</i>				360 Laporan	789.192.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.750.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan</i>				360 Laporan	105.005.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		157.507.500	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
			<i>Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan</i>				360 Laporan	138.404.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		207.606.000	SEKRETARIAT DAERAH
2,	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>Persentase Terlaksananya Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</i>	-			100 %	9.413.852.700,00						-	10.265.230.000	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	<i>Persentase Terlaksananya Koordinasi Bidang Pemerintahan</i>	-			100 %	163.313.000,00			-	-	-	-	199.673.670	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan</i>				4 Dokumen	30.777.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	41.406.084	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</i>				4 Dokumen	45.847.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	54.206.880	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</i>				6 Dokumen	86.689.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	104.060.706	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	<i>Persentase kegiatan terkait dengan kesejahteraan rakyat yang terkoordinasi</i>	-			100 %	8.837.350.100,00			-	-	-	-	9.531.390.983	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual</i>				12 Dokumen	8.837.350.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemaasyarakatan berdasarkan falsafah Adai Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Pengembangan Masyarakat Madani	-		9.531.390.983	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	<i>Persentase pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi hukum</i>	-			100 %	249.286.000,00			-	-	-	-	300.300.240	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			<i>Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun</i>				66 Dokumen	89.033.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	121.287.180	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			<i>Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum</i>				1 Kasus	151.595.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	165.027.840	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
			<i>Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi</i>				66 Dokumen	8.657.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	13.985.220	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	<i>Persentase pelaksanaan fasilitasi kerjasama daerah</i>	-			100 %	163.903.600,00			-	-	-	-	233.865.107	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri</i>				16 Dokumen	141.560.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		102.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.603.240	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama</i>				2 Laporan	22.343.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		51.261.867	SEKRETARIAT DAERAH
3,	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<i>Persentase terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang perekonomian</i>	-			100 %	603.227.000,00						-	840.700.000	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	<i>Persentase terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang perekonomian</i>	-			100 %	140.972.000,00						-	192.502.546	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</i>				1 Dokumen	24.319.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		36.311.680	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian</i>				1 Laporan	75.743.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.009.164	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil</i>				1 Dokumen	40.909.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		56.181.702	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	<i>Persentase pelaksanaan pembangunan daerah</i>	-			100 %	183.967.000,00			-	-	-		224.905.410	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah</i>				1 Dokumen	50.748.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		62.332.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan</i>				1 Laporan	63.087.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		78.413.214	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan</i>				1 Laporan	70.131.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		84.170.196	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	<i>Persentase pengadaan barang jasa melalui aplikasi SPSE sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</i>	-			100 %	186.421.000,00			-	-	-		255.653.412	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>				3 Dokumen	55.690.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		75.248.052	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				2 Dokumen	45.391.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		64.839.360	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				100 Orang	85.340.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		115.566.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Tersusunnya laporan sebagai penunjang kegiatan	-			100 %	91.867.000,00			-	-	-		167.638.632	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	56.202.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		87.455.820	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	35.664.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		43.510.14	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.04.000 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen		Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		36.672.672	SEKRETARIAT DAERAH
	J U M L A H							38.327.341.595							63.605.930.000	

Seluruh pendanaan kegiatan masing-masing bagian di Sekretariat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026.

Sekretariat Daerah dalam hal melaksanakan Misi yang diemban Kepala Daerah terdapat beberapa Misi yang dilaksanakan pada Sekretariat Daerah, yaitu : pada Misi ke- 4 yaitu : 4. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya. Adapun Rencana Kinerja OPD Tahun 2026, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Untuk pedoman pada Tahun 2026 di Sekretariat Daerah terdapat dalam Urusan Pemerintah yang mempunyai 3 Program dan 20 Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 38.327.341.595,00,- dan Tahun 2027 pagu anggaransebesar Rp. 63.605.930.000,00-. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan,
Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2026

No	Bidang Urusan	2026			2027			Ket
		Jumlah		Total Pagu (Rp)	Jumlah		Total Pagu Indikatif (Rp)	
		Program	Kegiatan		Program	Kegiatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Unsur Pendukung Urusan Pemerintah	3	20	38.327.341.595	3	20	63.605.930.000	

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan perangkat daerah, Renja Perangkat Daerah memiliki arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah karena Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah serta disesuaikan dengan arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam konteks tersebut, Sekretariat Daerah sebagai salah satu perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2025 ini menyusun rencana tahunan perangkat daerah berupa Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 tersebut berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026. Selain itu, Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 juga merepresentasikan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Sekretariat Daerah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Selain itu, penyusunan Renja Sekretariat Daerah juga mempedomani hasil evaluasi hasil Renja Sekretariat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Sekretariat Daerah tahun berjalan yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah tersebut dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Sekretariat Daerah .

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 memiliki keterkaitan erat dengan dokumen perencanaan lain, baik yang telah ditetapkan maupun dokumen perencanaan yang sedang disusun. Hal tersebut merupakan bentuk harmonisasi dan sinergitas antar dokumen

perencanaan, sehingga diharapkan perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat terlaksana secara efektif dan optimal.

Renja Sekretariat Daerah memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sangat tergantung kepada peran aktif pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Demikian Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan tahunan yang dilakukan di Sekretariat Daerah. Dengan penyusunan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja kinerja Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas, fungsi, program, kegiatan dan sub kegiatan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.





BUPATI LIMA PULUH KOTA

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 050/437/BUP-LK/XI/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 125 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Lima Puluh Kota Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);

14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota;
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Membentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan *Ex-Officio* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas secara umum :
 - a. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025;
 - b. Melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 Perangkat Daerah seperti Forum Perangkat Daerah, dan rapat-rapat lainnya; dan
 - c. Menyusun dan menyajikan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025, mulai dari Rancangan Awal sampai pada penetapan Renja, sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
 - a. Ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

- b. Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Sekretariat Daerah di lingkup bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Wakil Ketua II bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Sekretariat Daerah di lingkup bidang Perekonomian dan Pembangunan;
- d. Wakil Ketua III bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Sekretariat Daerah di lingkup bidang Administrasi Umum;
- e. Sekretaris bertugas mengecek dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
- f. Anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, menulis dan mengetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Tim dapat menetapkan pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota Tim.
- KELIMA** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2025 melalui DPA masing-masing Perangkat Daerah.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 050/45/BUP-LK/ XII /2024

TANGGAL : 31 DESEMBER 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	SEKRETARIAT DAERAH	
	Sekretaris Daerah	Ketua
	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	Wakil Ketua II
	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
	Kabag Perencanaan Dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Pemerintahan	Anggota
	Kabag Hukum	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	Anggota
	Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Hukum	Anggota
	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	Anggota
	Kasubag Protokol	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Sekretaris DPRD	Ketua
	Kabag Umum dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan	Anggota
	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	Anggota
	Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	Anggota
	Fungsional Pranata Humas	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
3.	INSPEKTORAT	
	Inspektur	Ketua
	Sekretariat	Sekretaris
	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota
	Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Perencana	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	Anggota
	Kasubag Administrasi Umum Dan Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada Inspektorat	Anggota
4.	DINAS KESEHATAN	
	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris
	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan	Anggota
	Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Epidemiologi	Anggota
	Fungsional Sanitarian	Anggota
	Fungsional Analisis Kebijakan	Anggota
	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota
	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF	Anggota
	Kabid Pembinaan Ketenagaan	Anggota
	Kabid Kebudayaan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Budaya	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
	Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	Anggota
	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Pengairan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Penata Ruang	Anggota
	Kepala Seksi Pertanahan	Anggota
	Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
7.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	Kepala Satpol PP	Ketua
	Sekretaris Satpol PP	Sekretaris
	Kepala Bidang Trantib	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Anggota
	Kepala Bidang PPUD	Anggota
	Kepala Bidang SDA	Anggota
	Kasubag Program & Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada Satpol PP	Anggota
8.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Sekretaris
	Kabid Pencegahan	Anggota
	Kabid Pemadam Dan Penyelamatan	Anggota
	Kabid Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan Dan Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota
9.	DINAS SOSIAL	
	Kepala Dinas Sosial	Ketua

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Sekretaris Dinas Sosial	Sekretaris
	Kabid Rehabilitasi Sosial	Anggota
	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Pekerja Sosial	Anggota
	Fungsional Penyuluh Sosial	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Sosial	Anggota
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	Kepala DPPKBPPPA	Ketua
	Sekretaris DPPKBPPPA	Sekretaris
	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	Anggota
	Pelaksana pada DPPKBPPPA	Anggota
12.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Kepala DPMPTSP	Ketua

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Sekretaris DPMPTSP	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Terpadu	Anggota
	Kabid Promosi	Anggota
	Kabid Perencanaan dan Pengembangan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada DPMPTSP	Anggota
13.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	
	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Ketua
	Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sekretaris
	Kepala Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Fungsional Pengawas Koperasi	Anggota
	Fungsional Penera	Anggota
	Fungsional Analisis Perdagangan	Anggota
	Fungsional Pengawas Perdagangan	Anggota
	Fungsional Pengawas Koperasi	Anggota
	Fungsional Analisis Kebijakan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
14.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Ketua
	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekretaris
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Industri	Anggota
	Kabid Sarana dan Prasarana Industri	Anggota
	Kabid Ketenagakerjaan	Anggota
	Kabid Transmigrasi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
	Fungsional Pengantar Kerja	Anggota
	Fungsional Mediator Hubungan Industrial	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
15.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Kepala Diskominfo	Ketua
	Sekretaris Diskominfo	Sekretaris
	Kabid Komunikasi Publik	Anggota
	Kabid Aplikasi Informatika	Anggota
	Kabid Statistik dan Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Kabid Persandian Dan Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada Diskominfo	Anggota
16.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Ketua
	Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kabid Pariwisata	Anggota
	Kabid Pemuda	Anggota
	Kabid Olahraga	Anggota
	Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota
17.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	
	Kepala DPMD/N	Ketua
	Sekretaris DPMD/N	Sekretaris
	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada DPMD/N	Anggota
18.	DINAS PERHUBUNGAN	
	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Sekretaris Dinas Perhubungan	Sekretaris
	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Anggota
	Kepala Bidang Prasarana	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
19.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Ketua
	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Sekretaris
	Kabid Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
	Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	Anggota
	Fungsional Analisis Lingkungan Hidup	Anggota
	Fungsional Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
20.	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	Kepala Distanhortbun	Ketua
	Sekretaris Distanhortbun	Sekretaris
	Kabid Sarana	Anggota
	Kabid Prasarana	Anggota
	Kabid Perlindungan Tanaman Dan Perizinan Usaha	Anggota
	Kabid penyuluhan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Fungsional Analisis Keuangan Pusat/Daerah	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Anggota
	Fungsional Pemeriksa Varietas Tanaman	Anggota
	Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Anggota
	Fungsional Pengawas Benih	Anggota
	Fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian	Anggota
	Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	Anggota
	Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Anggota
	Fungsional Penyuluh Pertanian	Anggota
	Fungsional Umum	Anggota
21. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
	Kabid Perbibitan dan Produksi	Anggota
	Kabid Keswan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kabid. Sarana dan Prasarana	Anggota
	Kabid Penyuluhan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Fungsional Analisis Keuangan Pusat/ Daerah	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak	Anggota
	Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Anggota
	Fungsional Penyuluh Pertanian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
22. DINAS PERIKANAN		
	Kepala Dinas Perikanan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perikanan	Sekretaris
	Kabid Pengembangan Sumberdaya Perikanan	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perikanan	Anggota
23. DINAS PANGAN		
	Kepala Dinas Pangan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pangan	Sekretaris
	Kabid Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
	Kabid Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Pangan	
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pangan	Anggota
24.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
	Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Fungsional Pustakawan	Anggota
	Fungsional Arsiparis	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pustaka dan Kearsipan	Anggota
25.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	Kepala Bappelitbangda	Ketua
	Sekretaris Bappelitbangda	Sekretaris
	Kabid Ekonomi Penelitian dan Pengembangan	Anggota
	Kabid SDM, Sosbud dan Pemerintahan Bappelitbangda	Anggota
	Kabid Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi Bappelitbangda	Anggota
	Kabid Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Bappelitbangda	Anggota
	Kasubag Program Bappelitbangda	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda	Anggota
	Kasubag Keuangan Bappelitbangda	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Perencana	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Statistisi	Anggota
	Pelaksana pada Bappelitbangda	Anggota
26.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ketua
	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
	Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kabid Pengembangan dan Disiplin ASN	Anggota
	Kabid Informasi Pengadaan dan Status PNS	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada BKPSDM	Anggota
27.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Ketua
	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Sekretaris
	Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah (AKPD)	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kabid Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kabid Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
28.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
	Kabid Ideologi dan Wasbang	Anggota
	Kabid Politik Dalam Negeri	Anggota
	Kabid Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	Anggota
	Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
29.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua
	Sekretaris BPBD	Sekretaris
	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Anggota
	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada BPBD	Anggota
30.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS	
	Direktur RSUD dr. Achmad Darwis	Ketua
	Kabag Tata Usaha	Sekretaris
	Kabid Perencanaan Pelaporan Sarana Prasarana dan Logistik	Anggota
	Kabid Pelayanan Penunjang dan Promosi Kesehatan	Anggota
	Kabid Pelayanan Medis dan Keperawatan	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana dan Logistik	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang Non Medis dan Promosi Kesehatan	Anggota
	Kasi Pelayanan Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Keperawatan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Humas	Anggota
	Kasubag Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada RSUD dr. Achmad Darwis	Anggota
31.	KECAMATAN GUGUAK	
	Camat Guguak	Ketua
	Sekretaris Camat Guguak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Guguak	Anggota
32.	KECAMATAN PAYAKUMBUH	
	Camat Payakumbuh	Ketua
	Sekretaris Camat Payakumbuh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Payakumbuh	Anggota
33.	KECAMATAN MUNGKA	
	Camat Mungka	Ketua
	Sekretaris Camat Mungka	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Mungka	Anggota
34.	KECAMATAN SULIKI	
	Camat Suliki	Ketua
	Sekretaris Camat Suliki	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Suliki	Anggota
35.	KECAMATAN BUKIK BARISAN	
	Camat Bukik Barisan	Ketua
	Sekretaris Camat Bukik Barisan	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Bukik Barisan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
36.	KECAMATAN GUNUANG OMEH	
	Camat Gunuang Omeh	Ketua
	Sekretaris Camat Gunuang Omeh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Gunuang Omeh	Anggota
37.	KECAMATAN LUAK	
	Camat Luak	Ketua
	Sekretaris Camat Luak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Luak	Anggota
38.	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	
	Camat Lareh Sago Halaban	Ketua
	Sekretaris Camat Lareh Sago Halaban	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksanaan pada Kecamatan Lareh Sago Halaban	Anggota
39.	KECAMATAN HARAU	
	Camat Harau	Ketua
	Sekretaris Camat Harau	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Harau	Anggota
40.	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	
	Camat Situjuh Limu Nagari	Ketua
	Sekretaris Camat Situjuh Limu Nagari	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Situjuh Limu Nagari	Anggota
41.	KECAMATAN AKABILURU	
	Camat Akabiluru	Ketua
	Sekretaris Camat Akabiluru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Akabiluru	Anggota
42.	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
	Camat Pangkalan Koto Baru	Ketua
	Sekretaris Camat Pangkalan Koto Baru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Anggota
43.	KECAMATAN KAPUR IX	
	Camat Kapur IX	Ketua
	Sekretaris Camat Kapur IX	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Kapur IX	Anggota

BUPATI LIMA PULUH KOTA



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);
 8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026, program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan rencana kerja pemerintah daerah provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja PD di lingkup pemerintahan Daerah.
10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Pasal 2

Renja PD dimaksudkan untuk menjabarkan Program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2026 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD.

Pasal 3

Renja PD disusun bertujuan untuk :

- a. pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- b. acuan dalam penyusunan rencana anggaran PD tahun 2026.

Pasal 4

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD tahun 2026 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2026 dan rencana strategis PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Renja PD disusun dengan sistematika:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
 - c. bab III memuat tujuan dan sasaran PD;
 - d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan PD; dan
 - e. bab V memuat penutup.
- (2) Renja PD tahun 2026 terdiri dari:
 - a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
 - b. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
 - d. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
 - e. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis;
 - f. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - g. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - h. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - j. Rencana Kerja Dinas Sosial;
 - k. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - m. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - o. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - p. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - q. Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 - r. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
 - s. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;

- t. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- u. Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
- v. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- w. Rencana Kerja Dinas Perikanan;
- x. Rencana Kerja Dinas Pangan;
- y. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- z. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- aa. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- bb. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- cc. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- dd. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ee. Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh;
- ff. Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan;
- gg. Rencana Kerja Kecamatan Suliki;
- hh. Rencana Kerja Kecamatan Guguk;
- ii. Rencana Kerja Kecamatan Mungka;
- jj. Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru;
- kk. Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh;
- ll. Rencana Kerja Kecamatan Luak;
- mm. Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban;
- nn. Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari;
- oo. Rencana Kerja Kecamatan Harau;
- pp. Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan
- qq. Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX.

- (3) Rencana Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Rencana Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Rencana Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (7) Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (8) Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (9) Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (10) Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (11) Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (12) Rencana Kerja Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (13) Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (14) Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (15) Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (16) Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (17) Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (18) Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (19) Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (20) Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (21) Rencana Kerja Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (22) Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (23) Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (24) Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (25) Rencana Kerja Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (26) Rencana Kerja Dinas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (27) Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (28) Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (29) Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (30) Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ab tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (31) Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ac tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (32) Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ad tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (33) Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ae tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (34) Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf af tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (35) Rencana Kerja Kecamatan Suliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ag tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (36) Rencana Kerja Kecamatan Guguak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ah tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (37) Rencana Kerja Kecamatan Mungka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ai tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (38) Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (39) Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ak tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (40) Rencana Kerja Kecamatan Luak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf al tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (41) Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf am tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (42) Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf an tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (43) Rencana Kerja Kecamatan Harau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ao tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (44) Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ap tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (45) Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aq tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD dilakukan oleh masing-masing kepala PD.

Pasal 7

- (1) Perubahan Renja PD tahun 2026 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- (2) Penetapan Perubahan Renja PD tahun 2026 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 30 Desember 2025



SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR.....41.....